

LAPORAN KINERJA PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN TAHUN 2017



**BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan telah menyelenggarakan fungsinya dalam : (1) Penyiapan koordinasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; (2) Pengkajian di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; (3) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; (4) Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; (5) Pelaksanaan pemantapan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; (6) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; (7) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; (8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan.

Mengacu visi, misi, arah, dan kebijakan BKP Kementerian Pertanian, disusun Visi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 2015-2019, yaitu: **“Pemantapan ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”**.

Untuk mencapai visi di atas, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mengemban misi, yaitu: (1) Membangun koordinasi yang sinergi dan efektif untuk bahan perumusan kebijakan peningkatan ketersediaan, akses dan penurunan kerawanan pangan, (2) Memantapkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya local, (3) Memantapkan penurunan kerawanan pangan, (4) Memantapkan akses pangan masyarakat, (5) Membangun model-model pengembangan ketersediaan, akses dan penurunan kerawanan pangan secara partisipatif dan transparan, (6) Membangun kapasitas aparatur dan sumberdaya manusia pertanian.

Sebagai penjabaran visi dan misi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: (1) Menyusun dan menganalisis bahan rumusan kebijakan peningkatan ketersediaan, akses dan penurunan kerawanan pangan, (2) Meningkatkan penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal, (3) Menurunkan persentase jumlah penduduk rawan pangan, (4) Mengembangkan desa dan kawasan mandiri pangan, (5) Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan sumberdaya manusia pertanian.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, serta mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi di lingkup Badan Ketahanan Pangan, disusun rencana kerja tahunan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2016 dengan sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu : (1) Tersedianya bahan rumusan kebijakan peningkatan ketersediaan, akses dan penurunan kerawanan pangan, (2) Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal; (3) Menurunnya persentase penduduk rawan pangan; (4) Berkembangnya desa dan kawasan mandiri pangan; (5) Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan sumberdaya manusia pertanian.

Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan, yang diukur dengan indikator kinerja: (1) Kawasan mandiri pangan sebanyak 78 kawasan; (2) Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan pada 35 lokasi; (3) Pemberdayaan petani kecil dan gender pada 33.600 KK dengan capaian 27.115 KK; (4) Dukungan produksi pertanian dan pemasaran pada 26.880 KK; (5) Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan pada 224 desa; (6) Dukungan manajemen dan administrasi SOLID sebanyak 12 bulan layanan; (7) Penanganan kerawanan pangan pada 1 lokasi.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut dicapai melalui Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan yang diarahkan untuk: (a) Peningkatan ketersediaan pangan yang beraneka ragam berbasis potensi sumber daya lokal; dan (b) Memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.

Untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 134.834.658.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 131.481.072.884 atau 97,51 persen yang dilaksanakan melalui Satker BKP Kementerian Pertanian, untuk kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 18.811.057.000 telah direalisasikan sebesar Rp 18.134.481.965 atau 96,40 persen dan di daerah sebesar Rp. 116.023.601.000 telah terealisasi sebesar Rp. 113.346.590.919 atau 97,69 persen.

Dalam hal akuntabilitas keuangan, laporan baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran, dan belum dapat menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini diakibatkan oleh sistem penganggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB	
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
II PERENCANAAN KINERJA	4
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019	4
1. Visi	4
2. Misi	4
3. Tujuan	4
4. Sasaran Strategis	5
5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	6
6. Program	7
7. Kegiatan Utama	7
8. Sasaran Indikator Kinerja	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2017	10
1. Sasaran Kinerja Tahun 2017	10
2. Penetapan Kinerja	11
III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja	12
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017	12
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Selama Lima Tahun Terakhir (2013-2017)	14
3. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	19
B. Realisasi Anggaran	21
C. Hasil Kinerja Tahun 2017	23
D. Capaian Kinerja Lainnya	78

E. Dukungan Instansi Lain	81
IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
2. Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Unit Organisasi Eselon II Kementerian/Lembaga
3. Matriks Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Berdasarkan PK Triwulan I-IV Tahun 2017
4. Matriks Target dan Realisasi Capaian Kinerja Berdasarkan PK Triwulan I-IV Tahun 2017

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019	5
2	Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019	10
3	Penetapan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2017	11
4	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017	12
5	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2013-2017	15
6	Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	21
7	Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Daerah	22
8	Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Pusat dan Daerah	22
9	Capaian Dana Bantuan Pemerintah di Kawasan Mandiri Pangan	24
10	Jumlah sampel per provinsi berdasarkan kapasitas penggilingan	40
11	Dukungan Data SKPG anggota Tim/Pokja SKPG	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Rekapitulasi Kondisi Aspek Akses Pangan Bulanan Secara Nasional Tahun 2017	63
2	Rekapitulasi Kondisi Aspek Pemanfaatan Pangan Bulanan Secara Nasional Tahun 2017	64

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan selama menjalankan tugas-tugas kedinasan dan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar prestasi yang telah dicapai.

Melalui LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja Pusat ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang telah dicapai dalam Tahun 2017. Terkait dengan hal itu diharapkan adanya masukan-masukan sebagai umpan balik yang bermanfaat dan alternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, yang semuanya mengarah pada peningkatan kinerja aparat.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran konstruktif untuk pelaksanaan tugas dimasa mendatang sangat diharapkan.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Jakarta, Januari 2018
Kepala Pusat
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Dr. Benny Rachman, APU
NIP. 19590210 198603 1001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Dengan demikian, ketahanan pangan mutlak harus dapat dicapai untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, agenda prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Kabinet Kerja yang dituangkan dalam Nawa Cita mengarahkan pembangunan pertanian untuk meningkatkan kedaulatan pangan agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kemudian sesuai dengan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019, dalam upaya meningkatkan kedaulatan pangan tersebut, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan merupakan salah satu unit kerja Eselon II pada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan pangan.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja. Melalui laporan akuntabilitas tersebut, terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pemberi mandat maupun publik, tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta tingkat capaian sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2017. Penyusunan LAKIN didasarkan pada : (1) Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Permenpan dan RB Nomor 53

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan (3) Permentan No 50 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

B. Tujuan

LAKIN disusun dengan tujuan:

1. Sebagai pertanggungjawaban Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatannya selama tahun 2017
2. Untuk mengetahui tingkat pencapaian atau keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
3. Sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2017, termasuk permasalahan, penyelesaian permasalahan dan saran masukan serta perbaikan kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan di tahun berikutnya

C. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan koordinasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
2. Pengkajian di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
5. Pelaksanaan pemantapan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan.

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri atas :

1. **Bidang Ketersediaan Pangan** terdiri dari Subbidang Analisis Ketersediaan Pangan dan Subbidang Sumberdaya Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan;
2. **Bidang Akses Pangan** terdiri dari Subbidang Analisis Akses Pangan dan Subbidang Pengembangan Akses Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang akses pangan;
3. **Bidang Kerawanan Pangan** terdiri dari Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan dan Subbidang Mitigasi Kerawanan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penurunan kerawanan pangan;
4. **Kelompok Jabatan Fungsional** terdiri atas jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan, dan dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Tugasnya melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Tahun Anggaran 2017 telah berupaya mengoptimalkan tugas dan fungsinya melalui dukungan sumberdaya manusia baik teknis maupun non teknis. Adapun dukungan sarana/prasarana lainnya berupa biaya, data/informasi, alat pengolah data/komputer, dana khususnya dalam melaksanakan pemantauan, pengkajian, dan perumusan kebijakan ketahanan pangan. Data pendukung yang terkait diantaranya adalah data statistik (penduduk, statistik pertanian, konsumsi, status gizi, kemiskinan, industri, ekspor/impor, stok pangan, dan lain-lain) secara *series*, serta data primer dan sekunder dari instansi terkait yang ada di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Penyusunan LAKIN Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tahun 2017 mengacu pada Renstra Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019. Renstra Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan sebagai berikut :

1. Visi

Visi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tahun 2015-2019, yaitu : **“Pemantapan ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.”**

2. Misi

Untuk mencapai visi di atas, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mengembangkan misi dalam tahun 2015 - 2019, yaitu :

- a. Membangun koordinasi yang sinergi dan efektif untuk bahan perumusan kebijakan peningkatan ketersediaan, akses dan penurunan kerawanan pangan;
- b. Memantapkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
- c. Memantapkan penurunan kerawanan pangan;
- d. Memantapkan akses pangan masyarakat;
- e. Membangun model-model pengembangan ketersediaan, akses dan penurunan kerawanan pangan secara partisipatif dan transparan;
- f. Membangun kapasitas aparatur dan sumberdaya manusia pertanian.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran visi dan misi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Menyusun dan menganalisis bahan rumusan kebijakan peningkatan ketersediaan, akses dan penurunan kerawanan pangan;
- b. Meningkatkan penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
- c. Menurunkan persentase jumlah penduduk rawan pangan;
- d. Mengembangkan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan;
- e. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan sumberdaya manusia pertanian.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Sasaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tahun 2015-2019 adalah:

- a. Tersedianya bahan rumusan kebijakan peningkatan ketersediaan, akses dan penurunan kerawanan pangan;
- b. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
- c. Menurunnya persentase penduduk rawan pangan;
- d. Berkembangnya Desa dan Kawasan Mandiri Pangan;
- e. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan sumberdaya manusia pertanian.

Tabel 1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Pemantapan ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan	1. Membangun koordinasi yang sinergi dan efektif untuk bahan perumusan kebijakan peningkatan ketersediaan, akses dan penurunan kerawanan pangan	1. Menyusun dan menganalisis bahan rumusan kebijakan peningkatan ketersediaan, akses dan penurunan kerawanan pangan	1. Tersedianya bahan rumusan kebijakan peningkatan ketersediaan, akses dan penurunan kerawanan pangan
	2. Memantapkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	2. Meningkatkan penyediaan sumber daya pangan berbasis sumber daya lokal	2. Meningkatnya penyediaan sumber daya pangan berbasis sumber daya lokal
	3. Memantapkan penurunan kerawanan pangan	3. Menyediakan data dan informasi penduduk rawan pangan	3. Tersedianya data dan informasi penduduk rawan pangan
	4. Memantapkan akses pangan masyarakat	4. Meningkatkan akses pangan masyarakat	4. Meningkatnya akses pangan masyarakat

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
	5. Membangun model-model pengembangan ketersediaan, akses dan penurunan kerawanan pangan secara partisipatif dan transparan	5. Mengembangkan desa dan kawasan mandiri pangan	5. Berkembangnya desa dan kawasan mandiri pangan
	6. Membangun kapasitas aparatur dan sumberdaya manusia pertanian	6. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan sumberdaya manusia pertanian	6. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan sumberdaya manusia pertanian

5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran strategis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tersebut, ditempuh melalui kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sebagai berikut :

a. Kebijakan

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan difokuskan pada :

- 1) Peningkatan ketersediaan pangan yang beraneka ragam berbasis potensi sumber daya lokal;
- 2) Mengembangkan kemampuan akses pangan secara sinergis dan partisipatif;
- 3) Memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan rawan pangan.

b. Strategi

Strategi Badan Ketahanan Pangan meliputi: (1) Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk meningkatkan produksi pangan domestik, menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat; (2) Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial, ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan; (3) Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya dan kearifan lokal; (4) Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal; dan (5) Penanganan keamanan pangan segar.

Adapun strategi yang ditempuh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 2015-2019 untuk peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan pangan meliputi:

- 1) Memobilisasi dan mengoptimalkan sumberdaya dan kemampuan (*experties*) yang ada (birokrasi, masyarakat, dan pakar setempat);
- 2) Memobilisasi sumberdaya (alam, finansial, sosial, teknologi) - daerah dan masyarakat;
- 3) Memanfaatkan bantuan teknis dari negara-negara asing dan lembaga internasional.

6. Program

Program yang dilaksanakan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada tahun 2015–2019 sesuai dengan program Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 yaitu “**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**”. Dalam rangka mencapai sasaran program Badan Ketahanan Pangan tersebut, sasaran program yang hendak dicapai oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan adalah pengembangan model-model peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan.

7. Kegiatan Utama

Sasaran output kegiatan adalah:

- 1) Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam dan menurunnya jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun; dan
- 2) Meningkatnya model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga / *Smallholder Livelihood Development (SOLID)*.

Kegiatan peningkatan kesejahteraan petani kecil (SOLID) merupakan kegiatan kerja sama dengan *International Fund for Agricultural Development (IFAD)* di 11 kabupaten di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Kegiatan ini sebelumnya merupakan sub kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan yang pada tahun 2016 beralih ke kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan.

Untuk mencapai sasaran (output) pertama yaitu meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan menurunnya jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun, terdapat 6 (enam) sub kegiatan:

- 1) Analisis neraca bahan makanan;
- 2) Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- 3) Kajian responsif dan antisipatif ketersediaan dan kerawanan pangan;
- 4) Analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- 5) Model desa/kawasan mandiri pangan; dan
- 6) Pemantauan ketersediaan dan kerawanan pangan.

Sedangkan untuk mencapai sasaran (output) kedua yaitu meningkatnya model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga/*Smallholder Livelihood Development (SOLID)*, terdapat 4 (empat) sub kegiatan:

- 1) Pemberdayaan petani kecil dan gender;
- 2) Dukungan produksi pertanian dan pemasaran;
- 3) Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan; dan
- 4) Dukungan manajemen dan administrasi SOLID.

Kegiatan tersebut secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Analisis neraca bahan makanan**, adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan data dan informasi ketersediaan pangan per kapita per tahun dalam suatu wilayah yang dapat digunakan dalam perencanaan produksi dan ketersediaan pangan.
- 2) **Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi**, adalah kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan terjadinya bencana rawan pangan kronis dan transien. Penanganan kerawanan pangan kronis dilakukan dengan penerapan instrumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), melalui tahap pengumpulan data, analisis, pemetaan, investigasi dan intervensi, sedangkan untuk penanganan kerawanan pangan transien dilakukan melalui investigasi dan intervensi.
- 3) **Kajian responsif dan antisipatif ketersediaan dan kerawanan pangan**, adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan informasi dan analisis secara komprehensif terhadap isu aktual ketersediaan, akses dan kerawanan pangan untuk rekomendasi penyusunan kebijakan dan program yang tepat dan sesuai untuk peningkatan ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan.
- 4) **Analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan**, adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan informasi tentang ketahanan dan kerentanan satu wilayah yang dapat dijadikan acuan bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program dan penentuan sasaran serta lokasi penanganan kerawanan pangan dan gizi di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.
- 5) **Model desa/kawasan mandiri pangan**, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa serta kawasan rawan pangan, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan, untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan pendekatan penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor, selama empat tahun secara berkesinambungan. Model kawasan mandiri pangan merupakan pengembangan kegiatan desa mandiri pangan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- 6) **Pemantauan ketersediaan dan kerawanan pangan**, adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan dan program peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan dan penanganan kerawanan pangan, antara lain melalui sinkronisasi sub sektor dan lintas sektor, analisis potensi sumberdaya pangan, analisis situasi akses

pangan, pengembangan akses pangan, penyebaran informasi ketersediaan, akses dan pangan.

- 7) **Pemberdayaan petani kecil dan gender**, adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya membenahi dan memperkuat peran anggota melalui kelembagaan kelompok mandiri (KM) yang berfungsi sebagai wadah organisasi masyarakat yang menjembatani peningkatan akses anggotanya dalam meningkatkan taraf hidupnya.
- 8) **Dukungan produksi pertanian dan pemasaran**, adalah kegiatan yang mendukung kegiatan produksi dan pemasaran, diberikan untuk memacu peningkatan hasil produksi, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, baik usaha pangan, hortikultura maupun perkebunan. Fasilitasi kegiatan produksi dan pemasaran diharapkan mendorong terjadinya peningkatan nilai tambah usaha anggota KM dalam melakukan usaha mandiri dengan membangun kerjasama antar anggota KM, baik usaha produksi, penanganan pasca panen maupun pengolahan hasil.
- 9) **Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan**, adalah kegiatan pengembangan rantai nilai didasarkan atas studi kelayakan komoditas perkebunan yang berpotensi untuk dikembangkan dalam skala luas untuk peningkatan pendapatan dan orientasi ekspor. Kegiatan ini memfasilitasi anggota KM dengan pilihan usaha komoditas unggulan yang dapat diorganisasikan secara massal dan berskala ekonomi dengan berbagai kegiatan pelatihan, pendampingan, penyediaan sarana dan prasarana atau peralatan yang dibutuhkan, temu usaha dan promosi serta pembangunan kemitraan atau jejaring pemasaran.
- 10) **Dukungan manajemen dan administrasi SOLID**, adalah kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas kinerja pelaksanaan kegiatan SOLID di pusat, provinsi dan kabupaten, yang diselenggarakan dengan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan/workshop, pertemuan konsolidasi periodik di pusat, provinsi dan kabupaten sesuai keahlian bidang yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing, serta kinerja bagi staf pelaksana untuk mendorong perbaikan kinerja masing-masing.

Disamping kegiatan diatas, kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran adalah peningkatan kapasitas aparat, yaitu rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta evaluasi kegiatan dalam pelaksanaan pemantauan produksi, penanggulangan rawan pangan, pengembangan akses pangan bagi aparat di daerah dan pusat.

8. Sasaran Indikator Kinerja

Dalam rangka mengukur kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, untuk mencapai sasaran strategis di atas, maka ditetapkan indikator kinerja kegiatan jangka menengah yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2019).

Tabel 2. Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019

No	Rincian Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan (Laporan)	35	35	35	35	35
2	Jumlah Lokasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (lokasi)	456	456	1	1	1
3	Jumlah hasil kajian Responsif dan Antisipatif Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	27	1	1	1	1
4	Jumlah Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA)	35	1	1	1	1
5	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan	192	190	78	98	98
6	Jumlah hasil Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	35	35	35	35	35
7	Jumlah KK pemberdayaan petani kecil dan gender	33.600	33.600	33.600	33.600	0
8	Jumlah KK yang mendukung produksi pertanian dan pemasaran	26.880	26.880	26.880	26.880	0
9	Jumlah desa yang mengembangkan rantai nilai tanaman perkebunan	224	224	224	224	0
10	Dukungan Manajemen dan Administrasi SOLID	12	12	12	12	0

B. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana kinerja pada tahun 2017 merupakan implementasi rencana jangka menengah yang dituangkan kedalam rencana kerja jangka pendek, yang mencakup tujuan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja berikut :

1) Sasaran Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan visi, misi dan tujuan strategis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2017 yang masih mengacu pada Renstra Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019, serta mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi di lingkup Badan Ketahanan Pangan, disusun sasaran strategis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2017 yang hendak dicapai, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Kawasan mandiri pangan sebanyak 78 kawasan;
- 2) Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan pada 35 lokasi;
- 3) Penanganan kerawanan pangan pada 1 lokasi.
- 4) Pemberdayaan petani kecil dan gender di 33.600 KK;
- 5) Dukungan produksi pertanian dan pemasaran pada 26.880 KK;
- 6) Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan pada 224 desa; dan
- 7) Dukungan manajemen dan administrasi SOLID 12 bulan layanan.

2) Penetapan Kinerja

Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3. Penetapan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2017

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Mantapnya ketersediaan dan penanganan rawan pangan	1. Jumlah kawasan mandiri pangan	78 kawasan
	2. Jumlah pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan	35 lokasi
	3. Jumlah KK pemberdayaan petani kecil dan gender	33.600 KK
	4. Jumlah KK yang mendukung produksi pertanian dan pemasaran	26.880 KK
	5. Jumlah desa yang mengembangkan rantai nilai tanaman perkebunan	224 Desa
	6. Dukungan manajemen dan administrasi SOLID	12 Bulan Layanan
	7. Jumlah penanganan kerawanan pangan	1 Lokasi

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 134.834.658.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang digunakan pada tahun 2017 mengacu pada sasaran yang telah disusun pada Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Penetapan Kinerja (PK), serta mengikuti perubahan kebijakan dan lingkungan strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan telah ditetapkan satu sasaran strategis, yaitu meningkatnya pemantapan ketersediaan dan penanganan rawan pangan. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2017 dilakukan dengan cara :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Capaian kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dapat dilihat dari realisasi kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun terhadap target yang telah disusun dalam penetapan kinerja (Renstra). Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya pemantapan ketersediaan dan penanganan rawan pangan	1. Jumlah kawasan mandiri pangan	78 kawasan	77 kawasan	99
	2. Jumlah pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan	35 lokasi	35 lokasi	100
	3. Jumlah KK pemberdayaan petani kecil dan gender	33.600 KK	27.115	81
	4. Jumlah KK yang mendukung produksi pertanian dan pemasaran	26.880 KK	26.880 KK	100
	5. Jumlah desa yang mengembangkan rantai nilai tanaman	224 Desa	224 Desa	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
	perkebunan			
	6. Dukungan manajemen dan administrasi SOLID	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100
	7. Jumlah penanganan kerawanan pangan	1 Lokasi	1 Lokasi	100

- a. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target untuk masing-masing indikator kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan telah tercapai seluruhnya dengan capaian kinerja masing-masing 100 persen dari target yang telah ditetapkan, kecuali untuk kegiatan kawasan mandiri pangan dan jumlah KK pemberdayaan petani kecil dan gender yang masing-masing mencapai 98 persen dan 81 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan kabupaten Kotawaringin Timur tidak melanjutkan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan karena kelompok tidak menyanggupi membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan terbatasnya jumlah KK miskin di lokasi sasaran SOLID. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dapat dikatakan **berhasil** (capaian kinerja antara 81 hingga 100 persen).
- b. Sampai dengan tahun 2017, Program SOLID telah dilaksanakan di 224 desa (100 persen dari target) dan dirasakan manfaatnya oleh 27.115 rumah tangga (81 persen dari target sasaran 33.600 KK). Kurangnya capaian jumlah KK penerima manfaat tersebut disebabkan oleh populasi penduduk yang terbatas, pengundurkan diri, perpindahan dan meninggal dunia. Rumah tangga tersebut tergabung kedalam 2.192 Kelompok Mandiri (KM) (98 persen dari target 2240 KM). Berdasarkan jenis kelompok, Sebagian besar KM berupa Kelompok Mandiri Campuran (868 KMC), kemudian Kelompok Mandiri Wanita (720 KMW) dan Kelompok Mandiri Pria (604 KMP). Jumlah kelompok tiap kabupaten bervariasi karena disesuaikan dengan sasaran Program SOLID yaitu jumlah penduduk miskin di desa di kabupaten sasaran Program SOLID.
- c. Berdasarkan hasil survey tahun 2017, tingkat kesejahteraan penerima manfaat SOLID lebih baik dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan bukan penerima manfaat SOLID. Hal tersebut sejalan dengan persepsi sebagian besar responden (KM sasaran) terhadap program SOLID yaitu sangat puas (57 persen) dan puas (42 persen) atas dampak partisipasi mereka dalam kegiatan SOLID di desanya, terhadap taraf kehidupan mereka.
- d. Situasi ketahanan pangan rumah tangga penerima manfaat SOLID dinilai dari persepsi kecukupan pangannya. 85 persen rumah tangga di wilayah SOLID telah cukup

pangan, sedangkan 15 persen rumah tangga lainnya masih mengalami kekurangan pangan dengan durasi rata-rata 1,9 minggu selama satu tahun terakhir. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan rumah tangga bukan penerima manfaat SOLID, yaitu 74 persen rumah tangga cukup pangan dan 26 persen rumah tangga yang mengalami kekurangan pangan dengan durasi rata-rata 3,8 minggu selama satu tahun terakhir.

- e. Apabila dilihat dari perubahan kondisi ketahanan pangan selama 12 bulan terakhir, Program SOLID mempunyai pengaruh terhadap rendahnya rumah tangga penerima manfaat SOLID yang mengalami kekurangan pangan dan durasi kekurangan pangan. Jumlah rumah tangga penerima manfaat SOLID yang mengalami peningkatan ketahanan pangan (56 persen) lebih besar dibandingkan rumah tangga bukan penerima manfaat Program SOLID (18 persen).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Selama Lima Tahun Terakhir (2013-2017)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017), capaian kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2013-2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian Kinerja (persen)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya pemantapan ketersediaan dan penanganan rawan pangan	1. Jumlah desa yang diberdayakan Demapan (reguler dan kawasan 2013)	1.625	798	-	-	-	1.625	798	-	-	-	100	100	-	-	-
	2. Jumlah desa mandiri pangan regular yang diberdayakan	-	-	429	-	-	-	-	429	-	-	-	-	100	-	-
	3. Jumlah kawasan mandiri pangan (Papua dan Papua Barat, Kepulauan dan Perbatasan yang diberdayakan)	-	-	107	107	103	-	-	107	103	-	-	-	100	96,26	100
	4. Jumlah pengembangan kawasan mandiri pangan 2015	-	-	85	85	78	-	-	85	78	77	-	-	100	91,76	98,71
	5. Analisis penanganan daerah/lokasi rawan pangan, SKPG	455	455	456	35	-	455	455	456	35	-	100	100	100	100	-

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target					Realisasi					Capaian Kinerja (persen)				
		2013 (3)	2014 (4)	2015 (5)	2016 (6)	2017 (7)	2013 (8)	2014 (9)	2015 (10)	2016 (11)	2017 (12)	2013 (13)	2014 (14)	2015 (15)	2016 (16)	2017 (17)
	6. Jumlah hasil penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA)	1	15	1	1	1	1	15	1	1	1	100	100	100	100	100
	7. Jumlah hasil kajian/pemantauan ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan	36	36	72 1	37 1	35	36	36	72 1	37 1	35	100	100	100 100	100 100	100
	8. Penguatan kapasitas aparat dan masyarakat	8	7	2	1	1	8	7	2	1	1	100	100	100	100	100
	9. Pengembangan akses pangan	-	-	3	1	-	-	-	3	1	-	-	-	100	100	-

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menunjukkan kisaran capaian kinerja 81-100 persen di setiap tahun untuk masing-masing target indikator, walaupun realisasi kinerja mengalami perubahan satuan maupun jumlah target di setiap tahunnya. Adanya perubahan yang terjadi ditahun-tahun tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Capaian kinerja untuk kegiatan Kawasan Mandiri Pangan sampai dengan tahun 2017 secara keseluruhan terealisasi dari segi keprograman, namun pada tahun 2017 terjadi penurunan sasaran yang dikarenakan kurangnya pemahaman SDM di daerah dan perubahan kelembagaan di daerah.
- b) Pada tahun 2017, Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan telah memasuki Tahap Pengembangan. Alokasi dana banper sebesar 100 juta di 78 kawasan, 77 Kabupaten di 23 Provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalsel, Kalteng, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo, Bali, NTB, NTT, Maluku). Hasil capaian kinerja baik di Pusat maupun di daerah telah mencapai 100 persen untuk kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.

Kawasan Mandiri Pangan tahun tidak mencapai 100 persen atau sebesar 98,16 persen, karena ada 1 (satu) kawasan yang tidak melanjutkan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan yaitu di Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak melanjutkan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan karena kelompok tidak menyanggupi membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK)

Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Perbatasan, Kepulauan dan Papua-Papua Barat telah memasuki tahap keberlanjutan/Exit Strategi sesuai target keprograman pada tahun 2013 dan merupakan tahun terakhir kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dan tidak dianggarkan lagi oleh APBN, keberlanjutan pembinaan akan dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten.

- c) Kegiatan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas, FSVA*) sebagai berikut:
 - Tahun 2013 penyusunan FSVA tingkat nasional yang merupakan pemutakhiran dari FSVA Nasional tahun 2009, yang menganalisis tingkat ketahanan dan kerentanan pangan sampai dengan level kabupaten dengan hasil 1 laporan di tingkat pusat.
 - Pada Tahun 2014, disusun FSVA nasional dan FSVA provinsi dengan hasil 1 laporan tingkat pusat dan 14 laporan tingkat provinsi. FSVA provinsi tahun 2014 merupakan pemutakhiran dari FSVA provinsi tahun 2010. FSVA provinsi menganalisis tingkat ketahanan dan kerentanan pangan wilayah sampai dengan level kecamatan.
 - Tahun 2015, kembali disusun peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) Nasional. Peta ini memperbaharui FSVA 2013 yang tidak jadi di *launching* mengingat situasi pada saat tersebut bertepatan dengan pemilihan dan pergantian presiden. Kegiatan penyusunan FSVA Nasional 2015 menghasilkan output berupa tersusunnya FSVA Nasional sebanyak 1 Buku atau terealisasi 100 persen.

- Tahun 2016, sebagai kelanjutan dari penyusunan FSVA Provinsi dengan tujuan untuk mengetahui ketahanan pangan di tingkat wilayah kabupaten yang analisisnya sampai tingkat desa, disusun FSVA kabupaten di 58 kabupaten, terdiri dari 44 kabupaten prioritas 1 dan 14 kabupaten prioritas 2 berdasarkan FSVA Nasional tahun 2015.
 - Tahun 2017 penyusunan FSVA untuk 52 kabupaten dari prioritas 3 berdasarkan FSVA Nasional tahun 2015.
- d) Pelaksanaan SKPG dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dilaksanakan di 34 provinsi, 421 kabupaten dan nasional, sedangkan untuk tahun 2017 hanya dilakukan di tingkat nasional.
- e) Hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan:
- Pada tahun 2013 hingga 2016 output dari indikator ini berupa laporan. Laporan pada tahun 2013 ditujukan pada penyusunan Neraca Bahan Makanan di tingkat provinsi sejumlah 33 buku dan di tingkat nasional sejumlah 1 buku serta satu laporan Analisis Situasi Akses Pangan dan satu laporan Pengembangan Akses Pangan, sehingga secara keseluruhan berjumlah 36 laporan. Walaupun dalam penetapan kinerja tahun 2013 hanya tertulis target sebanyak 34 laporan tetapi dihasilkan 36 laporan. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2014.
 - Untuk tahun 2016, indikator ini berupa laporan dan dokumen. Hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan pada tahun 2016 terdiri dari 35 laporan penyusunan NBM, 1 laporan analisis situasi akses pangan, 35 laporan kajian evaluasi dampak desa mandiri pangan, 1 laporan monitoring akses pangan di tingkat penggilingan dan 1 dokumen Kemandirian Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan.
 - Untuk tahun 2017, indikator ini berupa laporan dan dokumen. Hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan pada tahun 2017 terdiri dari 35 laporan penyusunan NBM, 1 laporan analisis akses pangan tingkat rumah tangga dan 1 laporan monitoring akses pangan di tingkat penggilingan
 - Pada tahun 2016, hasil kajian responsif dan antisipatif ketersediaan dan kerawanan pangan, outputnya berupa bahan rekomendasi pengembangan ketahanan pangan dan energi untuk kawasan perbatasan.
 - Pada tahun 2017, hasil kajian responsif dan antisipatif ketersediaan dan kerawanan pangan berupa bahan rekomendasi bantuan pangan non tunai serta wilayah penyangga kota besar.
- f) Penguatan kapasitas aparat dan masyarakat:
- Pada tahun 2013-2017 dilaksanakan penguatan kapasitas aparat dan masyarakat dengan capaian kinerja 100 persen.
 - Pada tahun 2017 peningkatan kapasitas aparat Kabupaten dan Provinsi berupa : pelatihan penyusunan analisis penanganan kerawanan pangan melalui Sistem

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk 34 provinsi dimana setiap provinsi diwakili oleh 2 orang aparat dari Provinsi dan Kabupaten. Output yang diharapkan berupa tersedianya laporan hasil situasi kerawanan pangan dan gizi secara bulan di provinsi dan kabupaten/kota.

- Pada tahun 2017 Kawasan Mandiri Pangan mengadakan Apresiasi Kawasan Mandiri Pangan untuk pendamping, pengurus LKK, FKK, di 78 kawasan. Dengan output Kawasan Mandiri Pangan di tahap pengembangan secara umum adalah memberikan pemahaman bagi peserta dalam pengelolaan Kawasan Mandiri Pangan serta memberikan pelatihan pemberdayaan masyarakat.
- Pada tahun 2017 penguatan kapasitas aparat berupa Apresiasi Akses Pangan berupa pelatihan aparat daerah yang menangani akses pangan dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peserta dapat melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan akses pangan masyarakat.

3. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab penurunan kinerja berdasarkan tabel di atas sebagai berikut :

1) Hambatan dan Permasalahan

Dari hasil evaluasi kinerja berbagai kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, ditemui beberapa permasalahan dan kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017 sebagai berikut :

- (1) Kesulitan dalam memperoleh data dan informasi untuk menghasilkan analisis yang akurat, karena data dan informasi sering dianggap bukan kegiatan prioritas;
- (2) Terbatasnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi menyebabkan petugas Kabupaten/Kota jarang melakukan kunjungan lapangan ke kelompok sasaran;
- (3) Tingginya mutasi pegawai di daerah, sangat mempengaruhi kinerja daerah dan kemampuan pegawai daerah dalam melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- (4) Kawasan Mandiri Pangan: (a) jumlah KK miskin hasil DDRT tidak semua menjadi anggota kelompok afinitas, karena alokasi anggaran terbatas; (b) koordinasi provinsi dan kabupaten melalui forum Dewan Ketahanan Pangan (DKP) belum optimal; (c) pembinaan pendamping masih belum optimal; dan (d) kurangnya dukungan daerah dalam keterpaduan/sinergitas kegiatan untuk mempercepat pembangunan di lokasi;
- (5) Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SKPG diantaranya yaitu:

- a) Ketersediaan data untuk analisis SKPG yaitu data yang sesuai dengan indikator SKPG yang ditetapkan, tidak seluruhnya dapat tersedia di setiap wilayah;
 - b) Terkait Koordinasi Tim/Pokja SKPG: (i) beberapa provinsi dan kabupaten belum membentuk Tim/Pokja SKPG; (ii) efektifitas kerja Tim/Pokja SKPG belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada proses analisis data dan pelaporan rutin oleh provinsi; (iii) Koordinasi dengan dinas terkait dalam melakukan pemantauan dan mengumpulkan data tidak semuanya berjalan dengan baik;
 - c) Aparat di beberapa daerah masih belum memahami kegiatan SKPG sebagai sistem pemantauan pangan dan gizi serta alat analisis;
 - d) Sering terjadinya mutasi pejabat/pegawai yang menangani kegiatan SKPG, sehingga menghambat proses analisis SKPG.
- (6) Permasalahan dalam penyusunan analisis ketersediaan pangan di daerah antara lain :
- a. Kurangnya aparat yang memiliki kemampuan menangani analisis ketersediaan pangan di daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan analisis ketersediaan pangan.
 - b. Belum semua Provinsi/Kabupaten terbentuknya tim NBM sehingga sulit untuk berkoordinasi lintas instansi dalam hal pengumpulan data.
 - c. Belum adanya angka konversi wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang lebih bisa menggambarkan kondisi wilayah setempat.
 - d. Banyak komoditas atau jenis pangan lokal yang belum masuk dalam NBM padahal komoditas tersebut merupakan potensi wilayah.
 - e. Belum dimanfaatkannya hasil analisis ketersediaan pangan sebagai dasar mengambil kebijakan.
 - f. Kurangnya dukungan dana APBD untuk kegiatan analisis ketersediaan pangan, walaupun hasil analisis tersebut sangat bermanfaat sebagai bahan kebijakan atau perencanaan.
 - g. Sering terjadinya mutasi pejabat/pegawai yang menangani kegiatan analisis ketersediaan pangan, sehingga menghambat proses penyusunan analisis ketersediaan pangan.
 - h. SDM yang belum paham mengenai analisis ketersediaan pangan, karena baru menangani.
- (7) Beberapa permasalahan pada kegiatan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan antara lain
- a. Adanya perubahan kelembagaan di provinsi dan kabupaten, sehingga penetapan petugas kabupaten yang melakukan pengambilan data mengalami keterlambatan
 - b. Penggilingan yang ditetapkan sebagai sampel mengalami perubahan statu, atau tidak beroperasi lagi

- c. Data populasi penggilingan yang ada sampai saat ini adalah data berdasarkan hasil Pendataan Industri Penggilingan Padi (PIPA) tahun 2012 yang sudah terlalu lama dan perlu dilakukan pembaharuan (*updating*) data.

2) Upaya yang dilakukan

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam rangka mengatasi permasalahan antara lain :

- 1) Meningkatkan koordinasi lintas sektor di pusat terkait penyediaan data dan informasi
- 2) Meningkatkan koordinasi Pusat dengan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan penyediaan data dan informasi serta pemantauan atau monitoring kegiatan;
- 3) Melaksanakan apresiasi atau bimbingan teknis terhadap petugas provinsi yang menangani kegiatan terkait di daerah, sehingga diharapkan petugas tersebut meningkat kemampuannya dalam melaksanakan kegiatan tersebut di daerah
- 4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang dilakukan di daerah, baik di pusat maupun kabupaten, untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut dengan segera

B. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan TA. 2017 telah dialokasikan anggaran melalui Satker BKP Kementerian Pertanian untuk alokasi anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 137.334.658.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 131.481.072.884 atau 97,51 persen dengan rincian per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 6. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

No	KETERANGAN	BKP PUSAT		
		PAGU	REALISASI	persen
1	Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan	6.019.970.000	5.849.467.250	97,17
2	Dukungan manajemen dan administrasi SOLID	11.319.287.000	11.043.187.025	97,56
3	Penanganan kerawanan pangan	1.471.800.000	1.241.827.690	84,37
	TOTAL	18.811.057.000	18.134.481.965	96,40

Untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan di daerah, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 116.023.601.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 113.346.590.919 atau 97,69 persen dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Daerah

No	KETERANGAN	BKP DAERAH		
		PAGU	REALISASI	persen
1	Kawasan mandiri pangan	14.646.000.000	14.167.721.922	96,73
2	Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan	3.500.000.000	3.080.192.934	88,01
3	Pemberdayaan petani kecil dan gender	6.031.419.000	5.736.408.000	95,11
4	Dukungan produksi pertanian dan pemasaran	47.440.824.000	46.487.353.563	97,99
5	Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan	11.782.963.000	11.716.737.900	99,44
6	Dukungan manajemen dan administrasi SOLID	32.622.395.000	32.158.176.600	98,58
	TOTAL	116.023.601.000	113.346.590.919	97,69

Untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan di Pusat dan Daerah, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 134.834.658.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 131.481.072.884 atau 97,51 persen dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Pusat dan Daerah

No	KETERANGAN	BKP PUSAT DAN DAERAH		
		PAGU	REALISASI	persen
1	Kawasan mandiri pangan	14.646.000.000	14.167.721.922	96,73
2	Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan	9.519.970.000	8.929.660.184	93,80
3	Pemberdayaan petani kecil dan gender	6.031.419.000	5.736.408.000	95,11
4	Mendukung produksi pertanian dan pemasaran	47.440.824.000	46.487.353.563	97,99
5	Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan	11.782.963.000	11.716.737.900	99,44
6	Dukungan manajemen dan administrasi SOLID	43.941.682.000	43.201.363.625	98,32
7	Penanganan kerawanan pangan	1.471.800.000	1.241.827.690	84,37
	TOTAL	134.834.658.000	131.481.072.884	97,51

C. Hasil Kinerja Tahun 2017

Hasil kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Mandiri Pangan

Perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian pangan, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan di perdesaan. Strategi pemberdayaan yang dilakukan melalui jalur ganda/*twin track strategy* yaitu:(1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan pemerintah sebagai *trigger*.

Untuk memantapkan dan mempercepat pengetasan kerawanan pangan, maka sejak tahun 2015 telah dikembangkan Kawasan Mandiri Pangan di 85 kawasan, 84 Kabupaten/Kota pada 24 Provinsi. Kawasan Mandiri Pangan merupakan kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari desa-desa terpilih, untuk menegakkan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan menjadi masyarakat mandiri.

Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan dalam 5 (lima) tahap selama 5 (lima) tahun:Tahap Persiapan (tahun I), Tahap Penumbuhan (tahun II), Tahap Pengembangan (tahun III), tahap kemandirian (tahun IV), dan Strategi Keberlanjutan (Tahun V).

Sasaran kegiatan Kawasan Mandiri Pangan adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan hasil analisa DDRT/Data Kemiskinan BPS/Data Kemiskinan lainnya di daerah yang rentan terhadap rawan pangan yang mempunyai potensi pengembangan komoditas unggulan. Untuk penentuan lokasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

- 1) Seleksi Kabupaten/Kota, didasarkan pada hasil peta FSVA tahun 2009 dan/atau Angka Rawan Pangan
- 2) Seleksi Kecamatan, didasarkan pada Indeks Potensi Kawasan (IPK)
- 3) Seleksi Desa, didasarkan pada Survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT)

Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2017 di alokasikan di 78 kawasan, 77 Kabupaten, 23 Provinsi yang memasuki tahap pengembangan dengan fokus kegiatan pada pengolahan pangan dan usaha lainnya, dengan dana Bantuan Pemerintah sebesar 100 juta untuk 5 desa. Dari hasil capaian kegiatan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2017 untuk alokasi dari 78 kawasan menjadi 77 kawasan hal ini dikarenakan kegiatan KMP di Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak mencairkan dana banper 2017 karena anggota kelompok tidak membuat RUK. Capaian dana Bantuan Pemerintah di Kawasan Mandiri Pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9. Capaian Dana Bantuan Pemerintah di Kawasan Mandiri Pangan

Tahun	2015	2016	2017
Sasaran	85 kawasan	78 kawasan	77 kawasan
Banper	-	7.800.000.000	7.650.000.000

Sedangkan untuk kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Perbatasan, Kepulauan dan Papua-Papua Barat tahun 2017 masuk pada tahun ke lima yaitu tahap keberlanjutan dimana sudah tidak diberikan dana APBN I, sehingga pembinaan daerah yang melanjutkan kegiatan KMP melalui :

- 1) Menerbitkan regulasi melalui peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota agar desa tersebut dibina untuk mengembangkan usaha.
- 2) Penyediaan alokasi dana APBD I/ APBD II.
- 3) Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga permodalan dalam rangka memperkuat usaha dan meningkatkan skala ekonomi.
- 4) LKK menjadi Badan Usaha Milik Desa/Kawasan.
- 5) Kelompok afinitas diharapkan menjadi badan usaha produktif, maka pemerintah provinsi, kabupaten/kota dapat memfasilitasi proses tersebut

Selain itu untuk mendukung kegiatan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2017 dilaksanakan kegiatan: (1) Apresiasi Kawasan Mandiri Pangan; (2) Pertemuan *Database* Kawasan Mandiri Pangan berbasis *Online*; (3) Penyusunan Aplikasi Database Kawasan Mandiri Pangan; dan (4) Workshop Akhir Kawasan Mandiri Pangan.

1) Apresiasi Kawasan Mandiri Pangan

Kegiatan Apresiasi Kawasan Mandiri Pangan Tahap Pengembangan TA. 2017 diselenggarakan di Izi Hotel, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 21 - 24 Maret 2017. Tujuan penyelenggaraan Apresiasi Kawasan Mandiri Pangan Tahap Pengembangan secara umum adalah memberikan pemahaman bagi peserta dalam pengelolaan Kawasan Mandiri Pangan serta memberikan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan bantuan pemerintah kepada peserta. Rumusan apresiasi kawasan mandiri pangan sebagai berikut: (1) Koordinator Pendamping/Aparat yang sudah mendapatkan pelatihan pada kegiatan apresiasi ini selanjutnya mentransfer ilmunya kepada pendamping kawasan dan swakarsa dengan sistem *Training of Trainer* (TOT), (2) proses pencairan dana Banper kepada kelompok penerima mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan No.173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Permentan Nomor 73/KPTS/ RC.110/J/12/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2017, (3) seluruh pengelolaan keuangan dana bantuan pemerintah kawasan dilakukan oleh Lembaga Keuangan Kawasan (LKK). LKK membuat AD/ART tentang pemanfaatan dana bantuan pemerintah berdasarkan kesepakatan bersama dengan Forum Komunikasi

Kawasan (FKK), Pendamping dan kelompok, (4) penyaluran dana banper untuk kelompok sesuai dengan hasil DDRT yang sudah ditetapkan berdasarkan SK Bupati/Kepala Dinas yang Menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Kepala Dinas yang Menangani Ketahanan Pangan Provinsi, (5) syarat untuk pencairan bantuan pemerintah ke KPPN dilengkapi SK penetapan lokasi kawasan, SK kelompok penerima manfaat, usulan RUK, nomor rekening kelompok, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Pakta integritas yang dibuat kelompok dengan PPK, kuitansi pembelian barang, dan syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, (6) transfer dana Bantuan Pemerintah dilakukan kepada salah satu rekening kelompok berdasarkan kesepakatan bersama antara kelompok, LKK, FKK, dan Pendamping. Kemudian setelah dana ditransfer, dana tersebut diserahkan kepada LKK untuk dikelola lebih lanjut, (7) pemanfaatan dana Banper Tahap Pengembangan digunakan untuk pengolahan hasil pertanian dan kegiatan pendukung lainnya, yang merupakan kelanjutan dari usaha budidaya yang dilakukan pada Tahap Penumbuhan, (8) pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah Tahap Pengembangan dapat mempertimbangkan pada hasil Rencana Pembangunan Wilayah Kawasan (RPWK) yang mengacu pada hasil musyawarah perencanaan dan pembangunan kecamatan. Dokumen RPWK disusun oleh FKK bersama-sama dengan pendamping, dan tim teknis kabupaten. Berdasarkan hasil RPWK tersebut, kelompok menyusun RUK yang mendukung komoditas unggulan di kawasan, (9) pemanfaatan Dana Bantuan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada kelompok untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen, (10) pencairan dana tersebut diharapkan dilaksanakan mulai bulan April 2017, tergantung dengan kesiapan administrasi kelompok, (11) dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh kelompok harus sesuai dengan nilai yang tertuang dalam SPM yang ditandatangani oleh PPK, (12) pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala, tepat waktu, berkelanjutan, dan berjenjang dari kawasan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat, (13) desa Kelompok dan pendamping menyampaikan formulir laporan yang disepakati kepada kabupaten/kota tentang perkembangan pelaksanaan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan. Kabupaten/kota memantau kegiatan lapang secara berkala (satu bulan sekali), mengevaluasi hasil pemantauan, serta menyampaikan laporan kawasan ke provinsi sesuai dengan format yang disepakati. Kabupaten memberikan *feedback* kepada kawasan serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di kabupaten/kota.

2) Pertemuan *Database* berbasis *Online*

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 dengan agenda pertemuan adalah paparan perkembangan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, pengenalan aplikasi database Kawasan Mandiri Pangan dan pelatihan input data Kawasan Mandiri Pangan. Peserta pertemuan yang menghadiri pertemuan ini adalah aparat Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten yang menangani kegiatan Kawasan Mandiri Pangan serta aparat Badan Ketahanan Pangan Pusat.

Aplikasi database Kawasan Mandiri Pangan berbasis online merupakan salah satu alat pelaporan yang dapat mempercepat pembaharuan dan pengaksesan data/informasi dari daerah seperti provinsi dan kabupaten dan dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait. Aplikasi database Kawasan Mandiri Pangan merupakan aplikasi berbasis web online yang dapat digunakan sebagai sarana, data entri dan pengolahan data sampai tingkat desa, untuk memberikan kemudahan pengelolaan data Kawasan Mandiri Pangan, agar data yang dikelola lebih cepat dalam hal proses, pelayanan data terkomputerisasi yang mudah digunakan, kapan saja dan dimana saja.

Aplikasi database Kawasan Mandiri Pangan diharapkan dapat membantu Kawasan Mandiri Pangan dalam berbagai macam pengelolaan database mulai dari pengelolaan data dan informasi kelompok, identitas kelompok, komoditas unggulan dan pengelolaan pendanaan. Selain itu aplikasi database juga difasilitasi dengan sistem pencarian dan pembuatan laporan.

3) Penyusunan Aplikasi Database Kawasan Mandiri Pangan berbasis Online

Salah satu indikator keberhasilan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan adalah terselenggaranya apresiasi dan pendampingan untuk penyusunan *database*. Cakupan *database* Kawasan Mandiri Pangan di antaranya mencakup: data lokasi kawasan, kelompok afinitas, jumlah anggota kelompok, penguatan modal yang diterima, perkembangan dana dan jenis kegiatan atau unit usaha. Sistem *database* yang berperan dalam dokumentasi data telah menjadi kebutuhan bagi sebuah organisasi karena merupakan unsur penting dalam pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan.

Dalam pembangunan *database* diperlukan suatu perancangan yang matang agar system dapat berjalan dengan baik. Database yang disusun dengan baik dan lengkap dapat sangat membantu dalam mengevaluasi kegiatan sehingga berguna bagi perbaikan (rencana) kegiatan di tahun berikutnya. Aplikasi *database* perlu dikembangkan secara *Online* sehingga dapat diperbaharui oleh lebih dari 1 orang petugas menggunakan lebih dari satu perlengkapan dalam rangka mempercepat pembaharuan data/informasi serta untuk memenuhi kebutuhan pengaksesan data/informasi dari berbagai lokasi oleh pihak terkait secara cepat. Dalam rangka mendukung kegiatan mitigasi kerawanan pangan termasuk di dalamnya kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, maka pada tahun 2017 perlu dikembangkan sistem *database* berbasis *Online*. Aplikasi database KMP dilakukan selama 3 bulan oleh pihak ke tiga yang berkompeten di bidang aplikasi, diharapkan dengan adanya database ini aparat di Provinsi dan Kabupaten dapat segera mengirimkan laporan database ke pusat secara online.

4) Workshop Evaluasi Kawasan Mandiri Pangan

Workshop Evaluasi Kawasan Mandiri Pangan diselenggarakan di Hotel Aston Tropicana, Bandung, pada tanggal 26 - 28 November 2017 dengan dihadiri oleh aparat yang melaksanakan kegiatan Kawasan Mandiri yang berasal dari 22 provinsi, 19 kabupaten/kota. Terdapat 7 provinsi tidak hadir yaitu : Papua Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara. Berdasarkan paparan dan diskusi yang dilaksanakan pada kegiatan Evaluasi Kawasan Mandiri Pangan tahun 2017, maka dapat disepakati hal-hal sebagai berikut:

- (1) Mengingat kegiatan KMP tahun 2018 tahap kemandirian sementara dimoratorium maka kegiatan pembinaan tetap dilakukan oleh provinsi dan kabupaten.
- (2) Aparat Provinsi dan Kabupaten diharapkan tetap melaporkan perkembangan usaha kelompok ke pusat (pelaporan keuangan/*cashflow* dari masing-masing kelompok)
- (3) Aparat provinsi dan kabupaten diharapkan segera menyusun profil dari masing-masing kawasan ke pusat.
- (4) Provinsi yang belum melengkapi fotokopi atau berkas hasil evaluasi administrasi sesuai matrik yang disampaikan pada pertemuan evaluasi KMP Bogor 17 November 2017 diharapkan dapat dilengkapi
- (5) Provinsi diharapkan menyampaikan perkembangan usaha kelompok kepada pusat setiap empat bulan sekali
- (6) Provinsi dan kabupaten perlu melakukan koordinasi dan sinergi dengan lintas sektor terkait (Dinas/Instansi dan swasta)
- (7) Kawasan Mandiri Pangan tahun 2018 terdiri atas 1 (satu) desa dengan jumlah kelompok afinitas sebanyak dua kelompok dan mempunyai jenis komoditas yang berbeda

2. Pemantauan Ketersediaan, Akses dan Kerawanan Pangan

Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan terdiri dari :

1) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan sangat penting untuk memberikan acuan kepada para pembuat keputusan dalam penyusunan program dan kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan potensi dampak ketahanan pangan yang tinggi.

Sejak tahun 2002 BKP telah bekerjasama dengan *World Food Programme* (WFP) untuk menyusun instrumen monitoring ketahanan pangan. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas –FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009 dan 2015, BKP bersama WFP telah melakukan pemutakhiran FIA yang selanjutnya diberi judul baru yaitu Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*). FSVA menyediakan informasi yang layak dijadikan acuan oleh pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan target serta intervensi penanganan kerawanan pangan dan gizi.

Penyusunan FSVA yang mengacu pada tiga aspek ketahanan pangan: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan konsumsi (pemanfaatan) pangan dan digambarkan secara lebih rinci kedalam beberapa indikator yang terkait dengan masalah ketahanan pangan, diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan informasi mengenai lokasi keberadaan wilayah yang memiliki kerentanan terhadap kerawanan pangan.

Pada tahun 2015 telah disusun FSVA Nasional dengan cakupan analisis pada tingkat kabupaten. Selanjutnya, untuk mempertajam hasil analisis tersebut pada tahun 2016 disusun FSVA Kabupaten dengan level analisis sampai dengan tingkat desa. Analisis FSVA Kabupaten pada tahun 2016 mencakup 58 kabupaten prioritas 1 dan 2 menurut hasil FSVA Nasional 2015. Selanjutnya, pada tahun 2017 disusun FSVA Kabupaten Prioritas 3 menurut hasil FSVA Nasional 2015 sebanyak 52 kabupaten, yaitu: Provinsi Jawa Timur (9 kabupaten); Nusa Tenggara Barat (8 kabupaten); Sulawesi Tengah (6 kabupaten); Kalimantan Selatan (5 kabupaten); Banten (3 kabupaten); Kalimantan Barat (3 kabupaten); Nusa Tenggara Timur (3 kabupaten); Aceh (2 kabupaten); Sumatera Barat (2 kabupaten); Jawa Barat (2 kabupaten); Sulawesi Barat (2 kabupaten); Sulawesi Tenggara (2 kabupaten); serta Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, serta Maluku Utara masing-masing 1 kabupaten.

Hasil FSVA yang telah disusun selanjutnya perlu didorong untuk ditingkatkan pemanfaatannya, salah satunya melalui advokasi kepada pengambil kebijakan. Melalui pertemuan advokasi dapat memberikan masukan kepada pimpinan daerah atau pengambil kebijakan agar rekomendasi hasil FSVA tersebut dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan/program ketahanan pangan di daerah.

Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait dengan penyusunan FSVA tahun 2017, dengan tujuan agar pelaksanaan penyusunan FSVA Kabupaten prioritas 3 berjalan dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara maksimal, adalah sebagai berikut: 1) Pertemuan penyusunan bahan acuan FSVA Kabupaten; 2) Pertemuan penyusunan FSVA kabupaten prioritas 3; dan 3) Advokasi hasil penyusunan FSVA. Selain itu, mengingat selama ini penyusunan FSVA terfokus pada wilayah kabupaten, pada tahun 2017 dicoba untuk membahas penyusunan FSVA perkotaan, yang diawali dengan pembahasan indikator dan metodologi yang bisa digunakan dalam penyusunan FSVA perkotaan, bentuk pertemuan dilakukan dengan FGD.

a) Pertemuan Penyusunan Bahan Acuan FSVA Kabupaten

Pertemuan penyusunan bahan acuan FSVA Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 2 – 4 Maret 2017 di Hotel Permata, Bogor, dengan peserta Tim FSVA BKP. Tujuan pertemuan adalah menghasilkan *template/acuan* penyusunan laporan FSVA Kabupaten. *Template* yang dihasilkan meliputi 3 aspek ketahanan pangan

(ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan pangan); dan analisis kompositnya, yang masing-masing meliputi:

- g) Ketersediaan pangan: 1) Gambaran situasi produksi pangan kabupaten yang bersangkutan, 2) Kerawanan transien yang berpengaruh pada ketersediaan pangan, 3) Indikator aspek ketersediaan pangan, 4) Pencapaian dalam pemenuhan ketersediaan pangan, serta 5) Strategi pengembangan ketersediaan pangan;
- h) Keterjangkauan pangan: 1) Gambaran situasi keterjangkauan pangan kabupaten, 2) Indikator aspek keterjangkauan pangan, 3) Pencapaian dalam pemenuhan keterjangkauan pangan, serta 4) Strategi pengembangan keterjangkauan pangan;
- i) Pemanfaatan pangan: 1) Gambaran situasi pemanfaatan pangan kabupaten, 2) Indikator aspek pemanfaatan pangan, 3) Pencapaian dalam pemenuhan pemanfaatan pangan, serta 4) Strategi pengembangan pemanfaatan pangan;
- j) Analisis ketahanan dan kerentanan pangan komposit: 1) Gambaran situasi ketahanan pangan kabupaten yang bersangkutan, 2) Strategi intervensi berdasarkan kelompok prioritas, serta 3) Kesimpulan yang dihasilkan dan Rekomendasi. Untuk memudahkan pemahaman bagi pengguna FSVA, pertemuan juga menyusun *outline* FSVA Kabupaten.

b) Pertemuan Penyusunan FSVA Kabupaten Prioritas 3

Pertemuan penyusunan FSVA Kabupaten Prioritas 3 dilaksanakan dari tanggal 30 Maret – 1 April 2017 di Hotel Onih, Bogor dengan peserta Tim FSVA BKP. Output pertemuan sebagai berikut :

- Paket data indikator FSVA 52 kabupaten prioritas 3;
- Paket data peta dasar 52 kabupaten prioritas 3;
- Hasil pengolahan analisis komposit;
- Hasil penyusunan peta (individu dan komposit)
- *Outline* laporan FSVA Kabupaten Prioritas 3

c) Advokasi Hasil Penyusunan FSVA

Pertemuan dalam rangka advokasi hasil penyusunan FSVA dilaksanakan dari tanggal 18 – 19 Mei 2017 bertempat di Hotel Grand Royal Panghegar, Jl.Merdeka No. 2, Bandung, Jawa Barat. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi atau pejabat yang menangani penyusunan FSVA.

Kegiatan advokasi hasil penyusunan FSVA ini dilakukan dengan cara pemaparan materi dan dilanjutkan dengan sesi diskusi/tanya jawab.

Adapun materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah Temuan Utama Hasil FSVA Nasional Tahun 2015, Tindak Lanjut dan Rekomendasi Berdasarkan Hasil FSVA Nasional Tahun 2015, Hasil Penyusunan FSVA Sebagai Acuan dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi FSVA oleh

Pemerintah Daerah Provinsi (diwakili oleh Provinsi Sumatera Utara), Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi FSVA oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (diwakili oleh Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat).

Berdasarkan hasil pemaparan, diskusi dan pembahasan selama pertemuan, rencana tindak lanjut yang disepakati antara lain sebagai berikut:

- Rencana Tindak Lanjut di Tingkat Daerah
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, khususnya SKPD yang menangani ketahanan pangan diharapkan dapat:
 - i. Menyusun FSVA level kecamatan dan level desa sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi penyusunan FSVA Nasional 2015.
 - ii. Melaporkan hasil penyusunan FSVA kepada Gubernur atau Bupati untuk dijadikan pengambilan kebijakan pembangunan sektor dan lintas sektor untuk mendukung ketahanan pangan.
 - iii. Melaporkan kepada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan kementerian/lembaga anggota DKP tingkat pusat untuk dimanfaatkan secara nasional untuk dijadikan dasar intervensi pelaksanaan program kegiatan ketahanan pangan.
 - iv. Mensosialisasikan hasil FSVA kepada seluruh SKPD melalui forum Dewan Ketahanan Pangan untuk dijadikan referensi intervensi kegiatan program,
 - v. Melakukan sinergi dan integrasi program lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil FSVA, khususnya dalam memanfaatkan Dana Desa dari Kemendes.
- Rencana Tindak Lanjut di Tingkat Pusat
 - i. Dalam rangka pemutakhiran data dan mengakomodasi perkembangan keadaan wilayah, Tim Penyusun FSVA di tingkat pusat agar dapat menyempurnakan metodologi dan cakupan wilayah analisis, khususnya untuk analisis wilayah perkotaan.
 - ii. Melakukan sosialisasi, advokasi dan pendampingan penyusunan FSVA baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

d) Penyusunan Indikator dan Metodologi FSVA Perkotaan

Penyusunan FSVA Nasional dengan analisis hingga tingkat kabupaten telah dilaksanakan pada tahun 2005, 2009 dan 2015. Namun demikian, analisis yang dilakukan selama ini belum mencakup wilayah perkotaan. Oleh karena itu, untuk mempertajam analisis dan pencapaian target pembangunan peningkatan ketahanan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan, maka diperlukan pembahasan indikator dan metodologi FSVA Perkotaan sebagai langkah awal penyusunan FSVA Perkotaan.

Pertemuan penyusunan indikator dan metodologi FSVA Perkotaan dilaksanakan dari tanggal 29-30 September 2017 bertempat di Hotel Permata Bogor. Pertemuan dibuka oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan kemudian dilanjutkan dengan

diskusi yang dipimpin oleh Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Pertemuan diikuti oleh perwakilan dari BPS, Bappenas, Kementerian Kesehatan, PSEKP Balitbang Kementerian Pertanian, TNP2K, IPB, WFP serta bidang/bagian lingkup BKP.

Terkait dengan penentuan indikator yang akan digunakan dalam penyusunan FSVA perkotaan, terdapat beberapa usulan indikator yaitu:

- i. Aspek Ketersediaan Pangan
 - Rasio konsumsi normatif karbohidrat terhadap ketersediaan pangan
 - Rasio konsumsi normatif protein terhadap ketersediaan pangan
 - Rasio jumlah retail (toko) dengan jumlah penduduk
- ii. Aspek Keterjangkauan/Akses Pangan
 - Persentase penduduk miskin
 - Persentase penduduk setengah pengangguran
 - Persentase rumah yang tidak layak
 - Pangsa pengeluaran untuk pangan
 - Rasio pasar/ritel dibanding jumlah penduduk
- iii. Aspek Pemanfaatan Pangan
 - Rata-rata lama sekolah perempuan
 - Angka harapan hidup
 - Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk
 - Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih
 - Balita stunting, underweight dan wasting
 - Prevalence of Undernourishment (PoU)
 - Persentase prevalensi obesitas
 - Persentase rumah tangga tanpa fasilitas sanitasi yang layak
 - Persentase balita dengan penyakit diare dan ISPA

e) Pengadaan Data dan Pencetakan Buku

Untuk mendukung penyusunan FSVA, maka diperlukan pengadaan peta dasar 2015 dan *raw data* indikator. Pengadaan dilakukan langsung ke BPS Pusat. Selain itu, dilakukan juga pencetakan panduan FSVA Kabupaten yang telah dibagikan kepada aparat daerah dalam pertemuan advokasi pada bulan Mei 2017 dan pencetakan buku ringkasan FSVA Kabupaten Prioritas 3 sebanyak 52 kabupaten.

2) Analisis Neraca Bahan Makanan

Ketahanan pangan merupakan unsur terpenting dari ketahanan nasional di bidang ekonomi. Pemantapan ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dari pembangunan nasional. Tingkat ketersediaan pangan suatu daerah, baik yang berasal dari produksi domestik, cadangan/stok maupun impor adalah suatu ukuran yang mencerminkan cukup tidaknya pangan di suatu daerah. Ketersediaan pangan tersebut harus didasarkan pada standar kecukupan pangan, baik kecukupan energi maupun

protein, yang dianjurkan untuk hidup sehat dan produktif. Jumlah pengadaan dan penggunaan pangan di suatu wilayah serta tingkat ketersediaan pangan per kapita dalam bentuk kandungan zat gizi (kalori dan protein) dapat diketahui melalui neraca bahan makanan (NBM).

Penyusunan neraca bahan makanan dilakukan setiap tahun sehingga dapat menggambarkan perkembangan tingkat ketersediaan pangan di suatu wilayah. Dengan demikian neraca bahan makanan dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan ketersediaan pangan khususnya dan pembangunan ketahanan pangan pada umumnya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan analisis ketersediaan pangan per kapita dalam bentuk energi, protein dan lemak. Hasil (outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan rumusan kebijakan ketersediaan pangan dengan indikator kinerja kegiatan berupa Buku Neraca Bahan Makanan Nasional 2015 Tetap dan 2016 Sementara. Output yang dihasilkan adalah data ketersediaan pangan dalam satuan volume dan satuan gizi dari berbagai komoditas bahan pangan.

Ringkasan Buku NBM Tahun 2015 Tetap dan 2016 Sementara sebagai berikut :

- a) Ketersediaan bahan makanan dalam bentuk zat gizi per kapita pada tahun 2015 yaitu energi sebesar 3.515 Kalori/hari, protein 90,86 gram/hari terdiri dari 72,33 gram/hari protein nabati (79,61 persen) dan hanya 18,53 gram/hari protein hewani (20,39 persen), serta lemak 55,14 gram/hari. Tahun 2016 (angka sementara), ketersediaan zat gizi untuk energi menjadi 3.964 Kalori/hari, protein 94,76 gram/hari terdiri dari 75,13 gram/hari protein nabati (79,29 persen) dan 19,63 gram/hari protein hewani (20,71persen), serta 71,89 gram/hari lemak ;
- b) Ketersediaan energi per kapita per hari pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 mengalami peningkatan dari 3.515 Kalori menjadi 3.964 Kalori atau naik 448 Kalori (12,75 persen), demikian pula protein naik dari 90,86 gram per kapita per hari menjadi 94,76 gram per kapita per hari atau naik 3,89 gram (4,29persen). Kenaikan tersebut disebabkan adanya peningkatan produksi beberapa komoditas utama antara lain padi, jagung, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, telur, ikan dan minyak goreng ;
- c) Ketersediaan energi, protein dan lemak pada tahun 2015 dan 2016 di dominasi bahan pangan sumber nabati. Pada tahun 2015 kontribusi energi pangan nabati sebesar 3.337 Kalori (94,92 persen), protein sebesar 72,33 gram (79,60persen), dan lemak sebesar 44,98 gram (81,58 persen) dari total energi, protein dan lemak. Pada tahun 2016 kontribusi energi, protein dan lemak dari bahan pangan sumber nabati masing-masing sebesar 3.772 Kalori (95,17 persen), protein sebesar 75,13 gram (79,29 persen), dan lemak sebesar 60,87 gram (84,67 persen) dari total energi, protein dan lemak ;

- d) Ketersediaan energi kelompok padi-padian pada tahun 2016 sebesar 2.367 Kal/kap/hari lebih tinggi dari tahun 2014 dan tahun 2015 masing-masing 2.294 Kal/kap/hari dan 2.189 Kal/kap/hari atau meningkat sebesar 178 Kal (8,13persen) dari tahun 2015. Ketersediaan protein dan lemak per kapita per hari pada tahun 2016 juga meningkat dibanding tahun 2015, masing-masing dari 52,66 gram menjadi 57,22 gram protein, dan lemak meningkat dari 11,02 gram menjadi 12,03 gram, atau meningkat masing-masing sebesar 4,56 gram (8,66persen) dan 1,00 gram (9,09 persen). Ketersediaan energi, protein dan lemak kelompok padi-padian pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan tahun 2016 karena sampai dengan Neraca ini disusun, data impor untuk komoditas gandum masih menggunakan data impor sementara sampai dengan bulan Agustus 2017.
- e) Kelompok Makanan berpati memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada ketersediaan energi. Komoditas ubi kayu dengan produksi 20,26 juta ton pada tahun 2016 memberikan kontribusi energi sebesar 40 Kalori dari singkong segar (16,88persen) dari total energi dari makanan berpati sebesar 237 Kalori) dan 125 Kalori atau 52,74persen dari hasil olahan berupa tapioka. Kelompok gula, kelompok ini terdiri dari komoditas gula pasir dan gula mangkok. energi per kapita per hari dari kelompok gula pada tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015, yaitu dari 256 Kalori menjadi 261 Kalori. Sumbangan energi tersebut didominasi oleh ketersediaan gula pasir yang meningkat pada tahun 2016 dibanding tahun 2015, yaitu dari 240 Kal/kapita/hari atau 24,10 kg/kapita/tahun menjadi 247 Kal/kapita/hari atau 24,77 kg/kapita/tahun, sedangkan gula mangkok hanya memberikan kontribusi energi sebesar 16 Kal/kapita/hari atau 1,51 kg/kapita/tahun turun menjadi 14 Kal/kapita/hari atau 1,38 kg/kapita/tahun.
- f) Buah/biji berminyak adalah kelompok bahan makanan yang mengandung minyak, yang berasal dari buah dan biji-bijian. Komoditas yang termasuk dalam kelompok ini adalah kacang tanah, kedelai, kacang hijau dan kelapa. Kelompok ini merupakan pensuplai protein nabati kedua terbesar setelah kelompok padi-padian. Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari dari kelompok buah/biji berminyak pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015, masing-masing dari 237 Kalori turun menjadi 221 Kalori, protein dari 15,97 gram menjadi 14,44 gram, dan lemak dari 15,55 gram menjadi 14,76 gram.
- g) Kelompok buah-buahan merupakan pangan sumber vitamin dan mineral. Kontribusi energi, protein dan lemak per kapita per hari pada tahun 2016 berturut-turut sebesar 65 Kalori, 0,72 gram protein dan 0,40 gram lemak. Ketersediaan tersebut masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan ketersediaan pada NBM tahun 2015 yaitu 71 Kalori, 0,77 gram protein dan 0,47 gram lemak. Dari sekian banyak komoditas buah-buahan, komoditas yang mempunyai kontribusi energi per kapita per hari cukup besar pada tahun 2016 adalah pisang, jeruk dan salak yaitu masing-masing 34 Kalori (25,74 kg/tahun), 5 Kalori (8,22 kg/tahun) dan 6 Kalori (2,53 kg/tahun).

- h) Kelompok sayuran juga merupakan kelompok pangan sumber vitamin dan mineral. Kontribusi sayuran terhadap ketersediaan energi dan protein pada tahun 2015 dan 2016 relatif sama, yaitu masing-masing sebesar 32 Kalori/kapita/hari dan 1,50 gram/kapita/hari pada tahun 2015 dan 32 Kalori/kapita/hari dan 1,49 gram/kapita/hari pada tahun 2016. Komoditas kentang merupakan penyumbang ketersediaan energi terbesar dari kelompok sayur-sayuran yaitu 6 Kalori/kapita/hari baik pada tahun 2015 maupun tahun 2016.
- i) Kelompok daging merupakan pangan sumber protein hewani, kelompok daging memberikan sumbangan energi dan protein hewani kedua terbesar setelah kelompok ikan. Ketersediaan energi dan protein dari komoditas daging pada tahun 2016 masing-masing sebesar 69 Kalori/kapita/hari dan 4,61 gram/kapita/hari, lebih tinggi dibandingkan ketersediaan energi dan protein tahun 2015 sebesar 62 Kalori/kapita/hari dan 4,12 gram/kapita/hari.
- Daging ayam ras menyumbang ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari terbesar pada kelompok daging yaitu masing-masing sebesar 31 Kalori, 1,86 gram protein dan 2,56 gram lemak pada tahun 2016. Kontribusi ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari pada tahun 2016 mengalami sedikit 12 ras dan telur itik. Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari kelompok telur pada tahun 2016 masing-masing sebesar 25 Kalori, 1,94 gram protein dan 1,85 gram lemak, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan ketersediaan per kapita perhari pada tahun 2015 yang sebesar 24 Kalori, 1,83 gram protein dan 1,75 gram lemak. Komoditas yang mendominasi sumbangan ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari dari kelompok telur adalah telur ayam ras, yang pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu masing-masing dari 18 Kalori, 1,43 gram protein dan 1,25 gram lemak (5,27 kg/tahun) menjadi 19 Kalori, 1,53 gram protein dan 1,33 gram lemak (5,63 kg/tahun).
- j) Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari pada tahun 2016 dari komoditas susu masing-masing sebesar 27 Kalori, 1,40 gram protein dan 1,53 gram lemak. Angka ketersediaan tersebut sedikit meningkat apabila dibandingkan dengan ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari tahun 2015 sebesar 24 Kalori, 1,25 gram protein dan 1,37 gram lemak. Meningkatnya ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari dari komoditas susu tersebut disebabkan oleh meningkatnya impor susu pada tahun 2016. Impor susu tahun 2016 naik 11,86 persen menjadi 3,12 juta ton.
- k) Komoditas perikanan tangkap dan budidaya memberikan sumbangan terhadap ketersediaan sumber protein hewani yang cukup tinggi. Pada tahun 2016, kontribusi kelompok ikan terhadap energi, protein dan lemak masing-masing sebesar 71 Kalori, 11,97 gram protein dan 1,39 gram lemak. Pada tahun 2017 ketersediaan per kapita per hari energi, protein dan lemak mengalami peningkatan masing-masing menjadi 92 Kalori, 14,41 gram dan 1,96 gram.

- l) Ketersediaan energi dan lemak per kapita per hari kelompok minyak dan lemak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari masing-masing 295 Kalori, 0,03 gram protein dan 17,07 gram lemak pada tahun 2015 menjadi 580 Kalori, 0,04 gram protein dan 32,09 gram lemak pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terjadi karena peningkatan produksi minyak goreng sawit dari 2,88 juta ton tahun 2015 menjadi 5,91 juta ton tahun 2016 dan menurunnya ekspor CPO dari 26,47 juta ton pada tahun 2015 menjadi 22,76 juta ton pada tahun 2016.
- m) Ketersediaan pangan tidak hanya dinilai dari kecukupan gizinya dalam bentuk energi dan protein, tetapi juga dinilai dari keberagaman ketersediaan gizi tersebut berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi pada Neraca Bahan Makanan (NBM).
- n) PPH Ketersediaan didefinisikan sebagai susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut atau relatif terhadap total energi. PPH Ketersediaan dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut (Tabel 10):
- Mengelompokkan ketersediaan energi bahan pangan dari 11 kelompok di NBM ke dalam 9 kelompok PPH (Kolom 1, Tabel 10),
 - Menjumlahkan energi bahan pangan ke dalam masing-masing kelompok bahan pangan (Kolom 2),
 - Menghitung prosentase Angka Kecukupan Energi (AKE) kelompok bahan pangan dengan cara membandingkan ketersediaan energi aktual dengan tingkat Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat ketersediaan sebesar 2,400 kkal/kapita/hari (Kolom 3),
 - Menghitung skor AKE kelompok bahan pangan (Skor riil, Kolom 5) dengan cara prosentase AKE (Kolom 3) dikalikan dengan bobot kelompok bahan pangan (Kolom 4),
 - Menghitung skor PPH kelompok bahan pangan (Kolom 6) dengan cara membandingkan skor AKE kelompok bahan pangan (Kolom 5) dengan skor maksimal kelompok bahan pangan (Kolom 7),
 - Menghitung skor PPH dengan cara menjumlahkan skor dari setiap kelompok bahan pangan (Total Kolom 6).

Tabel 10. Contoh Penghitungan Skor PPH Ketersediaan

No.	Kelompok Bahan Pangan 1	Energi (kkal) 2	% AKE 3	Bobot 4	Skor riil (%) 5	Skor PPH (%) 6	Skor Maks (%) 7
1.	Padi-padian	2.331	97,1	0,5	48,6	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	227	9,5	0,5	4,7	2,5	2,5
3.	Pangan Hewani	186	7,7	2,0	15,5	15,5	24,0
4.	Minyak dan Lemak	828	34,5	0,5	17,2	5,0	5,0
5.	Buah/biji berminyak	74	3,1	0,5	1,5	1,0	1,0
6.	Kacang-kacangan	118	4,9	2,0	9,8	9,8	10,0
7.	Gula	138	5,8	0,5	2,9	2,5	2,5
8.	Sayuran dan buah	104	4,3	5,0	21,7	21,7	30,0
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	4.006	166,9		122,0	83,04	100,0

- o) Rata-rata skor PPH tingkat ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2013 – 2017 sebesar 82.69 persen (Tabel 11) dengan kecenderungan menurun rata-rata 0,42 persen per tahun. Penurunan tersebut disebabkan salah satunya oleh perbedaan penghitungan angka PPH ketersediaan yang mulai tahun 2014 menggunakan angka ketersediaan energi 2.400 kkal/kapita/hari sesuai dengan rekomendasi WNPX tahun 2012. Pada tahun sebelumnya perhitungan PPH ketersediaan menggunakan angka ketersediaan energi 2.200 kkal/kap/hari. Berdasarkan perkembangan skor PPH pada Tabel 11, maka untuk mencapai keberagaman ketersediaan pangan yang ideal dan memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat ketersediaan yang dianjurkan, ketersediaan kelompok pangan hewani serta sayuran dan buah perlu ditingkatkan.

Tabel 11. Perkembangan skor PPH 2013-2017

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH (%)				
		2013	2014	2015	2016*	2017**
1.	Padi-padian	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2.	Umbi-umbian	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
3.	Pangan Hewani	14,30	13,30	13,84	14,85	15,49
4.	Minyak dan Lemak	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5.	Buah/biji berminyak	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6.	Kacang-kacangan	10,00	10,00	10,00	10,00	9,81
7.	Gula	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
8.	Sayuran dan buah	24,20	23,50	21,75	20,67	21,74
9.	Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	84,50	82,80	81,59	81,52	83,04
	Rata-Rata Skor PPH	82,69				
	Rata-Rata Pertumbuhan	-0,42				

Keterangan : * angka sementara

** angka sangat sementara

- p) Skor PPH ketersediaan tahun 2017 (Angka Sangat Sementara) dibandingkan dengan skor tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 1,86 persen. Capaian Skor PPH ketersediaan tahun 2017 sebesar 83.04 persen atau 92,22 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut dikategorikan berhasil/hampir mendekati target, sehingga capaian kinerja semakin baik.
- q) Skor PPH tahun 2017 hampir mencapai target karena masih rendahnya skor PPH kelompok bahan pangan hewani dan sayuran dan buah. Tidak tercapainya skor PPH maksimal untuk kelompok bahan pangan hewani dan sayuran dan buah tidak terlepas dari kebijakan Kementerian Pertanian pada tahun 2017 yang fokus pada beberapa komoditas pangan strategis nasional seperti padi, jagung dan kedelai. Meskipun upaya swasembada daging melalui program SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) telah dilakukan, namun hasilnya belum terlihat pada data produksi yang digunakan sebagai dasar penyusunan NBM dan PPH Ketersediaan Pangan. Oleh karena itu, untuk mencapai target PPH yang ditetapkan, ketersediaan kelompok bahan lain selain padi-padian dan umbi-umbian harus ditingkatkan.

3) Analisis Akses Pangan Tingkat Rumah Tangga

Secara konsep akses pangan rumah tangga dipengaruhi oleh aspek fisik, ekonomi dan sosial. Aspek fisik dicirikan oleh ketersediaan pangan disuatu wilayah baik sebagai hasil produksi setempat maupun pasokan pangan dari tempat lain yang kondisinya sangat tergantung pada jalur distribusi dan prasarana infrastruktur dasar seperti jalan dan pasar, aspek ekonomi terkait dengan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan, dan aspek sosial meliputi pendidikan dan modal sosial masyarakat.

Permasalahan akses pangan dapat bersifat sesaat maupun kronis. Permasalahan yang bersifat sesaat biasanya disebabkan oleh adanya gangguan terhadap potensi sumberdaya seperti konflik sosial dan bencana alam sedangkan yang bersifat kronis yang umumnya terjadi didaerah rawan pangan dapat disebabkan karena adanya ketimpangan pada salah satu aspek tersebut diatas atau bahkan pada ketiga-nya, sehingga penanganan yang harus diambil akan berbeda sesuai dengan penyebab timbulnya masalah aksesibilitas pangan tersebut.

Tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik apabila sasaran peningkatan akses pangan yaitu penduduk rawan pangan/penduduk di wilayah rawan pangan dengan aksesibilitas pangan rendah dan potensi yang bisa dikembangkan di wilayah tersebut dapat teridentifikasi dengan tepat, mengingat saat ini analisis kerawanan pangan yang telah dilakukan Badan Ketahanan Pangan lebih menitikberatkan pada kerawanan wilayah maka diperlukan satu tahapan analisis lagi untuk dapat mengidentifikasi rumah tangga rawan pangan.

Tujuan kegiatan analisis akses pangan adalah :

- (a) Mengetahui rumah tangga/kelompok rumahtangga yang mengalami masalah aksesibilitas pangan;
- (b) Mengetahui penyebab rendahnya akses pangan rumah tangga/kelompok rumahtangga;
- (c) Menyediakan bahan rumusan kebijakan penguatan aksesibilitas pangan masyarakat.

Analisis akses pangan rumah tangga dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- (1) Tahap pertama : Identifikasi Akses Pangan Tingkat Rumah Tangga

Identifikasi aksesibilitas pangan dari setiap rumah tangga pada satu desa dengan menggunakan KAP-RT (Kartu Akses Pangan-Rumah Tangga). KAP-RT berisi informasi keberagaman makanan yang dikonsumsi RT setiap hari selama sedikitnya satu minggu. Melalui kartu ini ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh antara lain : 1) Tersedianya data status aksesibilitas pangan rumah tangga (penduduk) kategori baik, cukup maupun rendah. Data ini dapat dijadikan database situasi akses pangan tingkat desa dan secara berjenjang dapat menjadi database kecamatan dan kabupaten, dan 2) Dapat mengedukasi masyarakat terkait pemanfaatan pangan yang beragam. Pada tahap identifikasi akses pangan Tahun 2017 dilaksanakan di 2 (dua) provinsi, yaitu di Desa Batu Beriga Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan di Desa Simanaere Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara.

Pada tahap ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu :

- (a) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Lokasi kegiatan Analisis Akses Pangan Rumah Tangga, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017, adalah desa rawan pangan di Desa Batu Beriga Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Pemilihan desa lokasi pelaksanaan Analisis Akses Pangan berdasarkan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016, Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar dipilih karena merupakan desa rawan pangan berdasarkan FSVA Kabupaten Bangka Tengah;
- Jumlah responden pada lokasi desa sasaran sebanyak 250 rumah tangga terdiri dari 6 RT meliputi :RT 02 (54 responden); RT 03 (36 responden); RT .04 (45 responden); RT 07 (37 responden); RT 08 (33 responden) dan RT 09 (45 responden);
- Hasil Identifikasi aksesibilitas pangan rumah tangga yang dilakukan dengan menggunakan KAP-RT untuk 250 responden diperoleh status aksesibilitas pangan yang masuk dalam kategori baik 152 kepala keluarga, kategori

sedang 91 kepala keluarga, kategori rendah tidak ada dan 7 kepala keluarga tidak ada data;

- Berdasarkan keberagaman pola konsumsi pangan dalam rumah tangga tidak ada rumah tangga yang masuk dalam kategori aksesibilitas pangan rendah.

(b) Provinsi Sumatera Utara

- Untuk menentukan provinsi dan kabupaten rawan pangan dipilih adalah wilayah dengan prioritas 1,2 dan 3 dimana 1 merupakan wilayah sangat rawan, 2 rawan dan 3 agak rawan, yang digambarkan dengan warna merah tua, merah dan merah muda;
- Wilayah rawan pangan yang dijadikan obyek analisis akses pangan adalah Kabupaten Nias Provinsi, Sumatera Utara diperoleh dari data FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) of Indonesia prioritas 1;
- Pemilihan Kecamatan rawan pangan pada kabupaten terpilih berdasarkan peta FSVA Nasional Tahun 2016 merupakan wilayah rawan pangan prioritas 1, yaitu Kecamatan Botomuzoi;
- Pemilihan Desa dilakukan secara purposive dengan pertimbangan Desa Simanaere merupakan desa yang memiliki jumlah rumah tangga miskin lebih dari 30 persen dari total jumlah penduduk di Desa Simanaere;
- Berdasarkan perhitungan Jumlah sampel minimal untuk kegiatan Identifikasi Aksesibilitas Pangan Rumah Tangga pada lokasi desa sasaran sebanyak 250 rumah tangga terdiri dari 6 Dusun meliputi: Dusun 1 (17 rumah tangga); Dusun 2 (41 rumah tangga); Dusun 3 (36 rumah tangga); Dusun 4 (74 rumah tangga); Dusun 5 (41 rumah tangga) dan Dusun 6 (41 rumah tangga);
- Dari hasil pengolahan data Identifikasi tingkat aksesibilitas pangan rumah tangga di Desa Simanaere yang dilakukan dengan menggunakan KAP-RT pada 250 rumah tangga, diperoleh status aksesibilitas akses pangan dimana terdapat 9 rumah tangga yang memiliki aksesibilitas kategori baik, 154 rumah tangga aksesibilitas pangannya sedang, dan 87 rumah tangga yang aksesibilitasnya rendah.

(2) Tahap kedua: Investigasi Akses Pangan Tingkat Rumah Tangga

Pelaksanaan investigasi kepada rumah tangga yang teridentifikasi rentan rawan pangan (kategori rendah), untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah aksesibilitas pangan baik dari aspek fisik, ekonomi maupun sosial. Pelaksanaan investigasi dilakukan setelah diperoleh skor konsumsi pangan setiap RT sebagai hasil dari identifikasi dengan KAP-RT.

Investigasi Analisis Akses Pangan di Tingkat Rumah Tangga di Desa Simanaere, Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara dilakukan berdasarkan hasil dari Identifikasi Rumah Tangga dengan menggunakan KAP-RT

sebanyak 87 kepala rumah tangga yang mengalami aksesibilitas pangan rendah tangga (rentan rawan pangan) atau 35persen dari jumlah sampel kepala rumah tangga yang diidentifikasi. Kemudian dilakukan investigasi dengan menggunakan kuesioner investigasi akses pangan rumah tangga untuk untuk mengetahui faktor-faktor apa yang paling berpengaruh terhadap akses pangan di tingkat rumah tangga yang mengalami rawan pangan.

Berdasarkan hasil investigasi diperoleh hasil sebagai berikut :

- Rendahnya pendapatan merupakan penyebab utama rendahnya aksesibilitas pangan rumah tangga di Desa Simanaere, Kecamatan Butomozoi. Rendahnya pendapatan tersebut disebabkan karena mereka hanya bertumpu pada satu sumber penghasilan yaitu sebagai petani karet. Penyebab rendahnya penghasilan petani karet di Desa Simanaere yaitu antara lain disebabkan : (1) Rendahnya pengetahuan petani dalam mengelola karet dengan benar, yaitu sebagian besar pohon karet di deres dengan cara yang kurang tepat sehingga kualitas dan kuantitasnya tidak masimal; (2) Menurunnya produktivitas tanaman karet yang disebabkan bagian bawah batang setinggi hampir satu meter penuh dengan sayatan melingkar untuk mengeluarkan getah karet, dan getah karet yang keluar hanya ditampung pada batok kelapa yang diletakkan diatas tanah; (3) Jarak tanam yang tidak teratur; (4) Perawatan tanaman jarang dilakukan, tanaman dibiarkan tumbuh begitu saja di hutan; (5) Penanaman kembali masih dilakukan secara alami; (6) Rata-rata petani mewarisi hutan karet dari pendahulunya dan belum pernah melakukan perubahan cara olah; (7) Saat ini di Desa Simanaere sedang mengalami musim penghujan sehingga menyebabkan jumlah produksi karet menurun dan harganya juga turun; (8) Selain dari segi penghasilan, keberadaan warung yang masih sangat sedikit di Desa Simanaere juga berpengaruh terhadap aksesibilitas pangan masyarakatnya.
- Sekitar 43 persen kepala keluarga memiliki tingkat pendidikan dasar yang mata pencahariaanya sebagai petani karet dan buruh karet. Hal ini berpengaruh besar pada tingkat pendapatan yang diperoleh.

(3) Tahap ketiga : Pelaksanaan Intervensi

Pelaksanaan Intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi lapangan, yang pada dasarnya meliputi: (a) Intervensi Pangan berupa program pangan dalam waktu dan skala tertentu; (b) Intervensi Non Pangan Fisik, sarana, prasarana untuk mendukung pangan antara lain:

- Optimalisasi penggunaan lahan (karet) menjadi lahan usahatani tanaman pangan, dan hortikultura melalui upaya perbaikan peningkatan daya dukung lahan, sehingga dapat menjadi lahan usahatani yang lebih produktif untuk menunjang terwujudnya ketahanan pangan danantisipasi kerawanan pangan;

- Lahan pekarangan memiliki potensi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis keluarga. Hanya saja, pemanfaatannya belum dilakukan secara maksimal. Mayoritas masyarakat masih memanfaatkan lahan pekarangan seadanya saja, padahal jika dioptimalkan dapat ditanami beragam jenis tanaman yang bisa memenuhi ketersediaan pangan bagi keluarga.
- Melakukan penyuluhan untuk pemanfaatan lahan pekarangan seperti mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan menambahkan intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa dan fasilitas umum lainnya (seperti sekolah, rumah ibadah), lahan terbuka hijau serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil;
- Memberikan keterampilan dalam mengelola potensi yang ada di sekitarnya;
- Membangun lapangan kerja baru;
- Pengadaan warung akses pangan
- Melakukan sosialisasi Keluarga Berencana (KB)
- Perlu di bangun lumbung pangan sebagai cadangan pangan masyarakat saat-saat krisis pangan.

4) Monitoring Stok Gabah dan Beras di Penggilingan

Penggilingan padi merupakan pusat pertemuan antara produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran gabah/beras sehingga merupakan mata rantai penting dalam suplai beras nasional. Industri penggilingan padi dituntut dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan beras, baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Penggilingan memiliki peranan penting antara lain : (1) Sebagai penyedia kebutuhan masyarakat; (2) Menjadi titik sentral dari suatu kawasan industri produksi padi, karena mampu berfungsi sebagai titik pertemuan antara perubahan bentuk padi menjadi hasil utama berupa beras; (3) Menentukan jumlah ketersediaan beras dan mutu atau kualitas beras; (4) Menentukan tingkat harga dan pendapatan yang diperoleh petani serta tingkat harga yang harus dibayar oleh konsumen; dan (5) Mampu membuka lapangan pekerjaan di daerah pedesaan.

Berdasarkan hasil Pendataan Industri Penggilingan Padi (PIPA) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2012, data jumlah penggilingan yang ada di Indonesia sebanyak 182.175 unit terdiri dari 167.840 unit (92,13 persen) dengan kapasitas kecil, 8.624 unit (4,73 persen) dengan kapasitas sedang, 2.117 unit (1,16 persen) dengan kapasitas besar, dan sebanyak 3.594 unit (1,97 persen) tidak tercatat golongan kapasitasnya.

Jumlah penggilingan padi tergantung pada kondisi lingkungan setempat dimana biasanya semakin tinggi produksi padi di suatu wilayah semakin banyak pula jumlah penggilingan padi di wilayah tersebut. Saat ini sebanyak 53persen jumlah penggilingan padi di Indonesia berada di pulau Jawa. Berdasarkan tempat usaha, penggilingan padi dibedakan menjadi dua yaitu penggilingan padi tetap dan penggilingan padi keliling. Lokasi penggilingan padi tetap selalu menetap di suatu wilayah sedangkan

penggilingan padi keliling umumnya bergerak mengikuti konsumen dari jasa penggilingan tersebut. Jumlah penggilingan padi keliling di Indonesia mencapai 11,5 persen dari total seluruh penggilingan. Munculnya penggilingan padi keliling mempermudah petani untuk menggiling padi tanpa harus memikirkan pengangkutan hasilnya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui stok gabah dan beras yang ada di penggilingan sebagai indikasi ketersediaan beras di masyarakat. Jumlah sampel pada kegiatan monitoring akses pangan sebanyak 970 penggilingan yang terdapat pada 86 kabupaten di 17 provinsi di Indonesia.

Sampel penggilingan terdiri dari 516 penggilingan besar, 258 penggilingan sedang, dan 86 penggilingan kecil. Persentase penggilingan responden dari masing-masing skala usaha dibandingkan dengan populasi jumlah penggilingan di Indonesia berdasarkan kapasitasnya adalah sebagai berikut penggilingan besar sebesar 25 persen, penggilingan sedang 4,3 persen, dan penggilingan kecil sebesar 0,06 persen.

Hasil kegiatan monitoring akses pangan di tingkat penggilingan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(1) Jumlah Sampel Per Provinsi

Persentase penggilingan responden dari masing-masing skala usaha dibandingkan dengan populasi jumlah penggilingan di Indonesia berdasarkan kapasitasnya adalah sebagai berikut : penggilingan besar sebesar 25 persen, penggilingan sedang 4,3 persen, dan penggilingan kecil sebesar 0,06 persen. Pengambilan sampel pada penggilingan skala besar lebih banyak dari penggilingan skala lainnya karena keragaman kapasitas terpasang pada skala tersebut relatif tinggi. Berikut jumlah populasi sampel dan jumlah sampel berdasarkan kapasitas penggilingan per provinsi pada kegiatan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan tahun 2017.

Tabel 12. Jumlah sampel per provinsi berdasarkan kapasitas penggilingan

No.	Provinsi	Jumlah Sampel (persen)			Total
		Besar	Sedang	Kecil	
1	Bali	5	7	8	20
2	Banten	5	13	22	40
3	DI Yogyakarta	0	0	10	10
4	Jawa Barat	64	40	56	160
5	Jambi	12	6	2	20
6	Jawa Tengah	53	61	26	140
7	Jawa Timur	38	38	44	120
8	Kalimantan Selatan	4	6	20	30
9	Kalimantan Tengah	5	13	2	20
10	Lampung	9	13	18	40
11	Nanggroe Aceh Darussalam	9	13	8	30

No.	Provinsi	Jumlah Sampel (persen)			Total
		Besar	Sedang	Kecil	
12	Nusa Tenggara Barat	12	8	20	40
13	Riau	0	4	6	10
14	Sulawesi Selatan	8	51	31	90
15	Sumatera Barat	2	7	21	30
16	Sumatera Selatan	18	18	4	40
17	Sumatera Utara	8	6	6	20
Jumlah		252	304	304	860
		(29,30)	(35,35)	(35,35)	

(2) Jumlah Penggilingan Yang Memberikan Data Selama April – Desember 2017

Persentase tertinggi jumlah penggilingan yang memberikan data terjadi pada bulan Juni 2017 yaitu sebesar 81,51 persen, dan terendah pada bulan Desember 2017 yaitu 70,35 persen, rata-rata data yang masuk setiap bulan sebesar 78,02 persen.

(3) Stok Gabah dan Beras di Penggilingan pada Bulan April – Desember 2017

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan dari bulan April – Desember 2017, diperoleh data stok gabah tertinggi terdapat pada bulan April 2017 sebesar 2.913.901 ton, dan stok terendah terjadi pada bulan Oktober 2017 sebesar 1.273.600 ton. Stok beras tertinggi terjadi pada bulan April 2017 yaitu sebesar 1.501.383 ton, dan stok terendah pada bulan Desember 2017 yaitu sebesar 636.444 ton. Stok tersebut tersebar di penggilingan besar, sedang maupun kecil.

(4) Stok Gabah dan Beras di Penggilingan Berdasarkan Kapasitasnya pada bulan April – Desember 2017

a) Stok gabah dan beras di penggilingan berdasarkan kapasitas besar pada bulan April – Desember 2017

Penggilingan padi besar memiliki kapasitas produksi lebih dari 3 ton beras per jam dengan konfigurasi mesin penggiling padi yang terdiri dari *dryer*, *cleaner*, *husker*, *separator* dan *polisher*. Penggilingan padi besar dapat melakukan 3 kali atau lebih proses penyosohan atau disebut dengan penggilingan padi 1 fase. Berdasarkan hasil pengumpulan data bulan April – Desember 2017 diperoleh data stok gabah di penggilingan kapasitas besar tertinggi terjadi pada bulan April 2017 sebanyak 89.752 ton, sedangkan stok beras tertinggi pada bulan April 2017 sebesar 238.327 ton.

b) Stok gabah dan beras di penggilingan kapasitas sedang pada bulan April – Desember 2017

Penggilingan padi kapasitas sedang atau Penggilingan Padi Menengah (PPM) memiliki kapasitas produksi 1,5 – 3 ton beras per jam dan umumnya memiliki konfigurasi mesin penggilingan padi yang terdiri dari *cleaner*, *husker* (mesin pemecah kulit), *separator* dan *polisher* (mesin penyosoh atau pemutih). Penggilingan padi menengah dapat melakukan 2 kali proses penyosohan atau disebut dengan penggilingan padi 2 fase.

Berdasarkan hasil pengambilan data bulan April – Desember 2017 diperoleh data stok gabah di penggilingan kapasitas sedang tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2017 yaitu sebanyak 327.506 ton dan stok beras tertinggi terjadi pada bulan April 2017 sebesar 165.139 ton.

c) Stok gabah dan beras di penggilingan kapasitas kecil pada bulan April – Desember 2017

Berdasarkan hasil pengumpulan data bulan April – Desember 2017 diperoleh data stok gabah dan beras di penggilingan kapasitas kecil tertinggi terjadi pada bulan Mei 2017 yaitu dimana stok gabah sebanyak 2.582.802 ton dan stok beras tertinggi juga terjadi pada bulan Mei 2017 sebanyak 1.101.218 ton.

(5) Perkiraan Ketersediaan dan Kebutuhan Beras Nasional

Perkiraan ketersediaan beras nasional tahun 2017 sebesar 48.112,4 ribu ton dan perkiraan kebutuhan beras nasional tahun 2017 sebesar 30.012,7 ribu ton. Kebutuhan beras nasional dihitung sebesar 124,89 kg/kap/thn. Dengan stok akhir tahun 2016 sebesar 1.735 ribu ton maka pada tahun 2017 tidak perlu ada impor. Jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 258.705.000 jiwa (proyeksi penduduk Indonesia 2010 – 2035, Bappenas – BPS).

(6) Hubungan Antara Perkiraan Ketersediaan dan Stok Beras di Penggilingan Pada Bulan April – Desember 2017

Apabila dibuat perbandingan perkiraan ketersediaan beras dan stok beras di penggilingan dari bulan April – Desember 2017 terdapat hubungan yang cukup signifikan antara ketersediaan beras dan stok beras di penggilingan, dimana hasil uji korelasi menunjukkan nilai $r = 0,76$. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara ketersediaan beras dengan stok beras di penggilingan. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, berarti semakin tinggi perkiraan ketersediaan beras per bulan maka stok beras di penggilingan per bulan juga meningkat.

(7) Hubungan Antara Perkiraan Kebutuhan Dan Stok Beras Di Penggilingan Pada April – Desember 2017

Berdasarkan hasil pengumpulan data monitoring stok gabah dan beras di penggilingan dari April – Desember 2017 jumlah stok beras di penggilingan hampir selalu lebih rendah dibanding perkiraan kebutuhan beras.

(8) Hubungan Antara Perkiraan Ketersediaan Beras, Stok Beras Di Penggilingan, Dan Perkiraan Kebutuhan Beras Bulan April – Desember 2017

Perkiraan kebutuhan beras untuk tahun 2017 cenderung stabil dari bulan ke bulan, sedangkan perkiraan ketersediaan beras bersifat fluktuatif tergantung pada musim, dimana pada saat musim panen seperti bulan Maret perkiraan ketersediaan berasnya sangat tinggi. Namun apabila dilihat dari jumlah stok beras di penggilingan, jumlahnya juga cukup stabil tidak terlalu terpengaruh oleh musim panen walaupun pada musim-musim panen jumlahnya cenderung tinggi namun meningkatnya tidak terlalu signifikan dibanding bulan-bulan lainnya. Stabilitasnya jumlah stok beras di penggilingan diduga karena pada umumnya apabila di suatu wilayah tidak terdapat stok gabah untuk digiling maka pengusaha penggilingan akan berusaha mencari gabah dari daerah-daerah lain untuk digiling, sehingga perusahaan penggilingan tersebut cenderung stabil.

5) Apresiasi Akses Pangan

Pertemuan Apresiasi Akses Pangan dilaksanakan pada tanggal 10-12 Maret 2017, di IZI Hotels Jl. Pakuan (Jl. Ciheuleut) No. 25, Baranangsiang, Bogor Jawa Barat. Dengan peserta aparat daerah yang menangani akses pangan dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peserta dapat melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan akses pangan masyarakat.

Materi yang disampaikan pada kegiatan Apresiasi Akses Pangan meliputi:

- (a) Arahan dan Pembukaan oleh Dr. Benny Rachman, APU, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Jakarta.
- (b) Kegiatan Akses Pangan Tahun 2017 disampaikan oleh Ir. Hasanuddin Rumra, M.Si, Kepala Bidang Akses Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan.
- (c) Penjelasan Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat disampaikan oleh Ir. Hasanuddin Rumra, M.Si, Kepala Bidang Akses Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan.
- (d) Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan :
- (e) Analisis Akses Pangan Tingkat Rumah Tangga, disampaikan oleh Siti Tarbiah, Kepala Sub Bidang Analisis Akses Pangan, Bidang Akses Pangan

- (f) Monitoring Stok Gabah dan beras di Penggilingan, disampaikan oleh Retno Utami, SP, MM, Kepala Sub Bidang Pengembangan Akses Pangan.
- (g) Sistem Informasi Data Stok Gabah dan Beras di Penggilingan, disampaikan oleh Ketut Wahyudi,
- (h) Pemanfaatan Kegiatan Akses Pangan (Analisis Akses Pangan Tingkat Rumah Tangga dan Monitoring Stok Gabah dan Beras di Penggilingan) untuk perumusan kebijakan, disampaikan oleh Dr. Ir. Tjuk Eko Hari Basuki, M.St.
- (i) Penyusunan langkah-langkah kebijakan pendukung peningkatan aksesibilitas pangan.

Adapun rumusan pertemuan ini sebagai berikut :

- (a) Apresiasi Akses Pangan ini diselenggarakan sebagai implementasi dari tanggung jawab bersama dalam mendukung peningkatan aksesibilitas pangan untuk pencapaian ketahanan pangan wilayah, khususnya dalam mempersiapkan aparat pemerintah daerah untuk melaksanakan perannya dalam perencanaan dan penyusunan program-program pembangunan ketahanan pangan, terkait peningkatan akses pangan masyarakat;
- (b) Sesuai dengan UU No 18 tahun 2012 tentang pangan, Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Penyelenggaraan pangan bertujuan untuk mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan;
- (c) Dalam kerangka sistem ketahanan pangan, akses pangan merupakan salah satu aspek ketahanan pangan yang sangat penting yang menghubungkan aspek ketersediaan dengan aspek pemanfaatan di rumah tangga atau masyarakat. Akses pangan dapat didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat, rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan baik dari produksi sendiri, pembelian, pemberian maupun bantuan, untuk memenuhi kecukupan pangan setiap saat berdasarkan sumberdaya yang dikuasai (sosial, teknologi, finansial/keuangan, alam dan manusia). Faktor yang mempengaruhi akses pangan adalah: (1) Aspek fisik, yaitu kondisi ketersediaan pangan ditingkat wilayah, rumah tangga, maupun individu baik sebagai hasil produksi sendiri/setempat, masukan dari wilayah lain dan bantuan; (2) Aspek ekonomi, yaitu kemampuan masyarakat, rumah tangga, maupun individu secara finansial untuk memperoleh pangan bagi kebutuhan rumah tangga, maupun individu; (3) Aspek Sosial, yaitu hubungan formal maupun informal pada masyarakat yang berperan dalam kemampuan rumah tangga

- maupun individu untuk memperoleh pangan pada berbagai situasi baik melalui pinjaman, pemberian dan bantuan;
- (d) Beberapa permasalahan terkait dengan akses pangan adalah semakin meningkatnya masyarakat rawan pangan yang menjadi indikasi masih rendahnya tingkat akses pangan masyarakat. Sementara instrumen analisis rawan pangan yang sudah ada, baru dapat menyajikan data rawan pangan pada tingkat wilayah dan belum dapat memberikan informasi data rumah tangga rawan pangan secara *up-to-date*, sehingga penanganan dan intervensi yang dilakukan belum tepat sasaran;
 - (e) Untuk mengetahui lebih tepat kelompok rumah tangga dan masalah yang menyebabkan terjadinya gangguan akses pangan kelompok rumah tangga tersebut, perlu dilakukan analisis akses pangan. Kegiatan analisis akses pangan dilakukan melalui tahap: (1) Identifikasi rumah tangga yang mengalami gangguan akses pangan menggunakan Kartu Akses Pangan Rumah Tangga; (2) Investigasi permasalahan yang menyebabkan gangguan akses pangan rumah tangga; dan (3) Penyusunan rekomendasi kebijakan peningkatan akses pangan rumah tangga. Dalam tahap identifikasi rumah tangga, instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi wilayah (desa) yang mengalami rawan pangan adalah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Hasil analisis adalah tersedianya data penduduk rawan akses pangan setiap desa, tersedianya informasi indikator yang mempengaruhi rawan akses pangan rumah tangga dan tersusunnya rekomendasi kebijakan dan perencanaan program intervensi langsung, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam menangani rawan pangan;
 - (f) Identifikasi terhadap rumah tangga yang mengalami gangguan aksesibilitas pangan menggunakan skor konsumsi pangan (*Food Consumption Score, FCS*) yaitu skor komposit yang berdasarkan keragaman konsumsi makanan, frekuensi makan dan asupan gizi penting lainnya dari berbagai jenis kelompok makanan. Berdasarkan skala skor yang sudah ditentukan, maka tingkat aksesibilitas pangan berdasarkan keragaman konsumsi adalah baik (skor >42), sedang (skor 28,5-42) dan rendah (skor 0-28). Penggunaan FCS dalam penentuan tingkat aksesibilitas pangan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH) karena FCS dihitung hanya berdasarkan pola konsumsi dan frekuensi konsumsi (hari) dalam jangka waktu tertentu, sedangkan skor PPH berdasarkan pola konsumsi dan jumlah kalori yang dikonsumsi, yang artinya harus dihitung dahulu jumlah bahan pangan dalam bentuk zat gizinya (kalori);
 - (g) Sementara itu, jumlah ketersediaan beras di masyarakat dipengaruhi oleh jumlah stok gabah dan beras di penggilingan. Monitoring stok gabah dan beras di penggilingan dilakukan dengan mengambil data stok gabah dan beras oleh enumerator yang ditunjuk ke penggilingan skala besar, sedang dan kecil secara periodik (setiap minggu);

- (h) Terkait dengan pemilihan sampel penggilingan, data sampel penggilingan perlu diverifikasi kembali dengan melihat ke lapangan untuk mengetahui penggilingan yang akan dijadikan sampel masih ada dan masih beroperasi. Data populasi penggilingan yang ada sampai saat ini adalah data berdasarkan hasil Pendataan Industri Penggilingan Padi (PIPA) tahun 2012 yang sudah terlalu lama dan perlu dilakukan pembaharuan (*updating*) data;
- (i) Untuk memberikan kemudahan informasi ketersediaan pangan, khususnya stok gabah dan beras di penggilingan secara *real-time*, serta untuk meningkatkan kinerja monitoring stok gabah dan beras di penggilingan dapat dibangun sistem informasi pangan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin berkembang. Konsep pengembangan sistem informasi pangan akan melibatkan beberapa pihak yaitu enumerator, administrator kabupaten, *back office* (Bidang Akses Pangan) dan Pusat Data Kementerian Pertanian;
- (j) Peningkatan Akses Pangan Masyarakat bertujuan untuk : a) Meningkatkan akses pangan masyarakat yang mengalami kerawanan pangan kronis dan transien; b) Meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat dalam mengatasi kejadian rawan pangan karena rendahnya akses pangan; c) Tersalurkannya dana bantuan pemerintah untuk dukungan program kepada masyarakat yang akses pangannya rendah; dan d) Meningkatnya akses pangan masyarakat melalui pemberian bantuan pemerintah yang mendukung program;
- (k) Dalam pemetaan wilayah rawan pangan, indikator akses terhadap pangan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu penduduk di bawah garis kemiskinan, rumah tangga tanpa akses ke listrik, desa tanpa akses ke jalan dan pengeluaran per kapita per bulan. Ilmu pengetahuan melalui perguruan tinggi atau lembaga penelitian, otoritas penentu kebijakan dan pengusaha harus berjalan seiring dalam upaya membangun dan mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- (l) Perencanaan ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan, khususnya beras, harus dilakukan secara periodik untuk menyusun rekomendasi kebijakan peningkatan akses pangan masyarakat, terutama dalam periode menjelang hari besar keagamaan dan nasional. Jumlah stok bahan pangan di masyarakat akan sangat menentukan jumlah ketersediaan atau pasokan bahan pangan di masyarakat yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi atau fluktuasi harga bahan pangan di masyarakat.

6) Kajian Responsif dan Antisipatif

Kegiatan kajian yang dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu: (1) Kajian Efektivitas Pelaksanaan Rastra-Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); dan (2) Kajian Penyangga Pangan Kota Besar.

a) Kajian Efektivitas Pelaksanaan Rastra-BPNT

Kajian ini dilaksanakan di 5 (lima) kota, yaitu Bandung, Makassar, Surabaya, Jakarta Barat, dan Bekasi. Agar bahasan kajian lebih terarah, maka lingkup kajian dibatasi sebagai berikut: (a) Program Rastra (Beras Sejahtera) yang dimaksud

dalam kajian ini adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah; (b) Bantuan Pangan Non Tunai yang dimaksud dalam kajian ini adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank; (c) Bahan pangan dalam program Rastra adalah beras; (d) Bahan Pangan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai ini adalah beras dan gula. Kajian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif, dengan hasil sebagai berikut:

- (1) Kebijakan pemerintah dalam transformasi pola subsidi (Program Rastra) menjadi pola bantuan sosial (Program BPNT) merupakan langkah maju untuk mengurangi penyimpangan program. Disisi lain penggunaan sistem perbankan dengan memanfaatkan keuangan digital dimaksudkan untuk memperluas keuangan inklusif.
- (2) Program Rastra (awalnya Raskin) dan BPNT mulai dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2017. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Rastra dan BPNT, permasalahan utama dalam program Rastra harus segera diselesaikan, yaitu ketidaktepatan sasaran penerima, rapel beras, jumlah beras yang diterima, dan kualitas beras yang masih rendah. Sedangkan pada Program BPNT masalah kesiapan e-warong dan jangkauan signal GPRS di semua wilayah, sasaran penerima dan kualitas beras juga perlu segera diatasi.
- (3) Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan Rastra dan BPNT kedepan lebih baik, untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu: (1) sosialisasi dan pengawasan dalam penentuan KPM; (2) pemutakhiran basis data terpadu yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan KPM; (3) membuat aturan jelas tentang titik distribusi Bulog ke KPM; (4) meningkatkan pelibatan peran pemerintah daerah dari titik distribusi Bulog ke KPM; (5) pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dari titik distribusi Bulog sampai ke KPM; (6) melakukan pengecekan di lokasi akhir titik distribusi (warung desa/kelurahan atau ketua RT setempat) terhadap beras sebelum diserahkan kepada KPM; (7) penambahan jumlah dan sebaran *e-warong*, dan (8) fasilitasi signal GPRS yang memadai dari provider.

Agar pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui Program Rastra dan BPNT dapat efektif dan mencapai sasaran, disarankan diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

- (1) Rastra tetap dipertahankan dengan berbagai perbaikan, serta mengintegrasikan dengan program-program pengentasan kemiskinan dan perbaikan gizi masyarakat yaitu BPNT. Kedua bentuk bantuan pangan ini bukan merupakan suatu pilihan, tetapi saling melengkapi antara satu dengan

lainnya sesuai dengan kesediaan infrastruktur dan kesiapan penyelenggaraan ketahanan pangan oleh pemerintah pusat dan daerah. Untuk wilayah kota dan kabupaten yang tergolong surplus beras, pelaksanaan bantuan pangan dilakukan dalam bentuk *voucher* (BPNT), sedangkan wilayah defisit beras dalam bentuk natura (Rastra).

- (2) Transformasi pola subsidi (Rastra) menjadi pola bantuan (BPNT) perlu dipertimbangkan secara matang karena kesiapan infrastruktur pendukung (jumlah dan sebaran e-warong, dan signal GPRS) belum siap. Oleh karena itu, jika akan diberlakukan secara masif pada tahun 2018 maka proses transformasi ini harus dilakukan secara bertahap dengan cara mengurangi jumlah penerima rastra dan menaikkan jumlah penerima BPNT dengan total KPM penerima (Rastra dan BPNT) tetap 15 juta KPM.
- (3) Bahan pangan yang diterima pada Program BPNT direncanakan tidak terbatas pada beras dan gula saja, namun dimungkinkan pada bahan pangan lain seperti telur, minyak goreng, dan terigu. Pada dasarnya penambahan jenis bahan pangan kepada KPM dapat dilakukan karena semakin banyak opsi yang ditawarkan, maka KPM lebih bisa memilih sesuai kebutuhannya. Namun demikian, dikarenakan belum siapnya bahan pangan dan infrastruktur pendukung lainnya, maka pelaksanaan Program BPNT kedepan lebih relevan dengan mengoptimalkan 2 (dua) jenis bahan pangan, yaitu beras dan telur sebagai sumber karbohidrat dan protein.
- (4) Mengingat kebijakan Rastra dan BPNT sangat terkait dengan peran dan kapasitas Bulog dalam melakukan serapan gabah-beras dari petani dan menjaga stabilisasi harga beras (Inpres No 5/2015), maka pemerintah perlu meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

b) Kajian Penyangga Pangan Kota Besar

Kajian ini dilaksanakan di DKI Jakarta dan wilayah penyangga: Lampung Timur, Lampung Selatan, Serang, Lebak, Pandeglang, Purwakarta, Subang, Karawang, Cianjur, Sukabumi. Lingkup pembahasan kajian ini bersifat kewilayahan berupa DKI Jakarta sebagai ibukota dengan wilayah penyangganya. Agar bahasan kajian lebih terarah, maka lingkup kajian dibatasi sebagai berikut: (a) Kota Besar adalah wilayah yang menjadi ibukota, dalam hal ini adalah DKI Jakarta; (b) Wilayah penyangga yang dimaksud adalah: Lampung Timur, Lampung Selatan, Serang, Lebak, Pandeglang, Purwakarta, Subang, Karawang, Cianjur, Sukabumi; dan (c) Pangan pokok&strategis: Beras dan Cabai. Kajian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif, dengan hasil hasil kajian sebagai berikut:

- (1) Wilayah penyangga DKI Jakarta memiliki potensi surplus beras sebesar 2,35 juta ton, sedangkan kekurangan/defisit beras DKI Jakarta sebanyak 1,18 juta ton. Jumlah beras eksisting dari wilayah penyangga ke DKI Jakarta hanya sebesar 834 ribu ton atau masih kekurangan 346 ribu ton. Namun demikian

masih terdapat potensi beras yang bisa dialihkan sebesar 434 ribu ton ke DKI Jakarta, dengan demikian seluruh kebutuhan beras dapat disupply dari wilayah penyangga.

- (2) Sedangkan untuk komoditas cabai, total surplus wilayah penyangga sebesar 77 ribu ton, sedangkan kebutuhan total DKI Jakarta sebesar 49 ribu ton. Angka kebutuhan ini masih belum memperhitungkan konsumsi diluar Rumah Tangga, misalnya kebutuhan industri dan hotel, restoran, serta rumah makan (horeka). Jumlah cabai eksisting dari wilayah penyangga ke DKI Jakarta dan sekitarnya sebesar 67 ribu ton, artinya kebutuhan konsumsi cabai di DKI Jakarta sudah terpenuhi dari 3 kabupaten penyangga.
- (3) Dalam rangka penyediaan pasokan dari wilayah penyangga ke kota besar perlu mempertimbangkan produksi dan keutuhan konsumsi beras dan cabai domestic. Kabupaten Lebak, Cianjur, dan Purwakarta kurang potensial dalam mensupply beras ke DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan hampir sebagian besar produksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan surplus yang dihasilkan relatif kecil. Sedangkan untuk komoditas cabai hanya 3 kabupaten utama yang dapat diandalkan dalam supply ke DKI Jakarta, yaitu Cianjur, Sukabumi, dan Lampung Selatan. Penyediaan beras dan cabai ke kota besar dapat dilakukan dengan mengoptimalkan wilayah terdekat agar lebih efektif dan efisien serta memotong rantai pasok dan distribusi yang panjang. Hal ini penting dilakukan agar gejolak harga yang sering terjadi di kota besar dapat diatasi dengan baik

Implikasi/ rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan: Agar penyediaan pasokan dari wilayah penyangga ke kota besar dapat efektif dan mencapai sasaran, disarankan diambil beberapa kebijakan sebagai berikut: Pertama, alur distribusi pasokan pangan pokok dan strategis (Beras dan Cabai) dari wilayah penyangga tidak hanya ke DKI Jakarta namun juga ke wilayah lain yang sudah bekerjasama sejak lama. Bukan perkara mudah untuk mengubah alur distribusi yang sudah ada, untuk itu perlu jaminan harga dan kontinyuitas penyediaan pasokan dari wilayah penyangga ke kota besar. Kedua, penyediaan dan distribusi pasokan beras dan cabai ke DKI Jakarta selama ini hanya dilakukan business to business dan belum melibatkan keterlibatan pemerintah antar daerah. Oleh sebab itu diperlukan payung hukum yang jelas tentang kerja sama antar daerah (kota besar dan kabupaten penyangga pangan) dalam bidang penyelenggaraan ketahanan pangan. Ketiga, pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pangan (beras dan cabai) tidak dapat dilaksanakan oleh dinas daerah terkait saja, namun perlu melibatkan seluruh komponen pengambil kebijakan. Oleh sebab itu pelibatan Kementerian/Lembaga terkait diperlukan untuk memperlancar jalur distribusi pasokan. Keempat, penyediaan pangan (beras dan cabai) dari wilayah penyangga ke kota besar berimplikasi pada margin keuntungan yang diterima oleh petani

sebagai konsekuensi dari penyediaan pangan ke luar wilayah. Oleh karena itu dalam rangka mensejahterakan petani dan menciptakan keadilan, maka pemberian subsidi input bagi kelompok tani/gabungan kelompok tani wilayah penyangga perlu diprioritaskan.

3. Pemberdayaan petani kecil dan gender

Sampai dengan akhir 2017 pendampingan terhadap KM dan KK yang dibentuk sejak Tahun 2011 – 2015 dilakukan kepada 2.192 KM dan 27.187 KK sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 8. Target sebanyak 2240 KM atau 10 KM per desa tidak tercapai, demikian juga dengan jumlah anggota KM yang hanya mencapai 27.187 KK atau sekitar 80.91persen dari target 33.600 KK. Tidak tercapainya target jumlah KK penerima manfaat tersebut disebabkan oleh populasi penduduk yang terbatas, mengundurkan diri, perpindahan dan meninggal dunia.

Untuk memperoleh dana hibah prestasi (*MF-Matching Fund*) dan dana bergulir (*RF-Revolving Fund*), kelembagaan KM penerima manfaat Kegiatan SOLID telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten yang menangani ketahanan pangan dan telah dilakukan penilaian. Sampai dengan akhir Juni 2017, MF dan RF yang telah direalisasikan kepada 2.192 KM sebesar Rp.118,490,395,700. Sejak dibentuknya KM, pendamping LSM telah melakukan pendampingan dalam hal pengelolaan keuangan. Dana hibah prestasi (MF) dan dana usaha produktif (RF) diharapkan dapat menjadi modal usaha KM untuk dikelola dan dikembangkan. Dana KM dikelola dan dimanfaatkan untuk usaha bersama, demplot, pinjaman usaha anggota, konsumtif, pendidikan dan kesehatan. Penggunaan pinjaman dicatat dan dilaporkan oleh Fasdes - LSM secara periodik bulanan di masing masing KM.

4. Dukungan produksi pertanian dan pemasaran

Bila dilihat jumlah desa menurut komoditas yang ditanam anggota KM, maka Kacang Tanah (67 desa) merupakan komoditi yang terbesar, diikuti Sayuran (28 desa), Ubi kayu (27 desa), Jagung (25 desa), dan Ubi Jalar (19 desa). Komoditas lainnya, seperti Talas, Pisang, Pepaya, Nanas, Cabe, Bawang Merah, Kacang Hijau, Sagu, Hotong, Kedelai dan Jahe, ditanam oleh petani di kurang dari 16 desa.

Jumlah Desa tidak mencerminkan atau tidak berbanding lurus dengan jumlah luasan lahan tanam per komoditi. Tanaman yang dominan menurut luas lahan adalah Kacang tanah (975.2 Ha), Ubi Kayu (501.8 Ha), Sayuran (282.8 Ha), Bawang Merah (220.8 Ha), Talas (207.0 Ha), Jagung (201.2 Ha), dan Pisang (171.2 Ha). Sedangkan komoditi lainnya, yaitu Ubi Jalar, Cabe, Sagu, Kacang Hijau, Pepaya, Nanas, Kedelai, dan Jahe, masing-masing luasnya tidak lebih dari 40 Ha. Total luas tanam anggota KM di Provinsi Maluku untuk seluruh komoditi tanaman pangan adalah 8,152 Ha.

Jumlah produksi tanaman pangan yang diusahakan oleh KM di Provinsi Maluku mencapai 12,532,085 kg/tahun, yang didominasi oleh tanaman Kacang Tanah (1,844,083 kg/ th), Ubi

Kayu (1,317,885 kg/th), Pisang (774,173 kg/th), Sayuran (690,742 kg/th), Jagung (689,180 kg/th), Bawang merah (648,124 kg/th), dan Talas (529,275 kg/th). Sedangkan produksi komoditas lainnya kecil.

Dari segi produktifitas, komoditas Pisang adalah yang tertinggi, yaitu 4,522 kg/ha/th, disusul komoditas Jagung (3,425 kg/ha/th), Bawang Merah (2,935 kg/ha/th), Ubi Kayu (2,626 kg/ha/th), dan Sayuran (2,443 kg/ha/th). Komodita lainnya di bawah angka tersebut.

Bila dilihat jumlah desa menurut komoditas yang ditanam anggota KM di Provinsi Maluku Utara, maka Ubi Kayu (68 desa) dan Kacang Tanah (68 desa) merupakan komoditi yang terbesar, diikuti Jagung (59 desa), Pisang (31 desa), Sayuran (27 desa), Padi ladang (27 desa), Jagung Manis (22 desa), Ubi Jalar (18 desa), dan Kacang Hijau (13 desa). Komoditas lainnya, seperti Cabe, Sagu, Padi Sawah, Talas, Sere, Semangka dan Jahe, ditanam oleh petani kurang dari 13 desa.

Seperti halnya di Provinsi Maluku, bahwa jumlah desa tidak mencerminkan atau tidak berbanding lurus dengan jumlah luasan tanam per komoditi, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 15. Tanaman yang dominan menurut luas lahan adalah Kacang tanah (768 Ha), Ubi Kayu (747 Ha), Padi Ladang (714 ha), Jagung (572 Ha), Jagung manis (212 ha), Pisang (170 ha), Sayuran (130 Ha), dan Ubi Jalar (88 ha). Sedangkan komoditi lainnya, yaitu Bawang Merah, Cabe, Padi Sawah, Sagu, dan lainnya, masing-masing luasnya tidak lebih dari 40 Ha. Total luas tanam anggota KM di Provinsi Maluku untuk seluruh komoditi adalah 3,551 Ha.

5. Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan

Dilihat dari jumlah desa menurut komoditi tanaman perkebunan yang ditanam anggota KM di Provinsi Maluku, tanaman Kakao (44 desa) merupakan komoditi yang terbesar, diikuti Kelapa (40 desa), Cengkeh (26 desa), dan Pala (26 desa).

Jumlah Desa berbanding lurus dengan jumlah luasan lahan tanam per komoditi tanaman perkebunan. Total luas tanam anggota KM di Provinsi Maluku untuk seluruh komoditi tanaman perkebunan adalah 3,783.7 Ha.

Kecuali Kabupaten Buru di Provinsi Maluku, tanaman Kakao banyak ditanam oleh anggota KM, dengan produksi hampir 2 juta kg, atau rata-rata produktifitasnya sekitar 1,4 ton per ha per tahun. Kecuali Kabupaten Buru dan SBT, usaha kelapa yang diolah menjadi kopra banyak dilakukan oleh anggota KM, dengan total produksi kelapa/kopra mencapai 2.36 juta kg atau produktifitas rata-ratanya mencapai 1,812 kg/ha/th. Sedangkan tanaman Pala banyak dibudidayakan di Kabupaten Buru Selatan, Maluku Tengah, dan SBT

Dilihat dari jumlah desa menurut komoditi tanaman perkebunan yang ditanam anggota KM di Provinsi Maluku Utara, Kelapa (64 desa) merupakan komoditi yang terbesar, diikuti Kakao (59 desa), Cengkeh (43 desa), dan Pala (10 desa).

Jumlah desa berbanding lurus dengan jumlah luasan lahan tanam per komoditi tanaman perkebunan. Total luas tanam anggota KM di Provinsi Maluku Utara untuk seluruh komoditi tanaman perkebunan adalah 4,694 Ha.

Hanya sedikit tanaman Kakao yang diusahakan oleh anggota KM di Maluku Utara, dengan produksi hanya sekitar 9 ton, atau rata-rata produktifitasnya sekitar 207 kg per ha per tahun. Di Provinsi Maluku Utara, usaha yang dominan adalah kelapa yang diolah menjadi kopra, dengan total produksi kelapa/kopra mencapai 1.75 juta kg atau produktifitas rata-ratanya mencapai 657 kg/ha/th. Kecuali Kabupaten Halut, tanaman Pala banyak dibudidayakan oleh anggota KM.

6. Dukungan manajemen dan administrasi SOLID

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan SOLID, sekretariat SOLID dibentuk di masing-masing satuan kerja, yaitu sekretariat SOLID di tingkat pusat, Sekretariat SOLID di tingkat provinsi dan Sekretariat SOLID di tingkat kabupaten.

Sekretariat SOLID di tingkat pusat dibantu oleh konsultan individu manajemen, monitoring dan evaluasi, pengadaan barang dan jasa serta perusahaan konsultan yang menempatkan wakilnya di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Sekretariat SOLID di tingkat provinsi dibantu oleh konsultan pemberdayaan masyarakat dan gender dan konsultan value chain yang ditunjuk oleh perusahaan konsultan di tingkat pusat dan dibantu oleh LSM lokal yang melakukan pendampingan di desa-desa sasaran SOLID.

Sekretariat SOLID di tingkat kabupaten dibantu oleh konsultan pertanian dan perkebunan yang ditunjuk oleh konsultan pusat, supervisor LSM yang ditempatkan di kabupaten, fasilitator desa yang ditempatkan di desa-desa sasaran SOLID dan PPL.

Pelaksanaan kegiatan SOLID 2017 dibiayai dengan menggunakan dana pinjaman, hibah dan rupiah murni pendampinga dengan total Rp. 109.196.888.000. Realisasi sampai dengan akhir Desember 2017 sebesar Rp. 107.141.863.088 atau 98.12persen.

7. Penanganan kerawanan pangan

1) Peningkatan Akses Pangan Masyarakat

Dalam kerangka ketahanan pangan, keterjangkauan (akses pangan) merupakan salah satu aspek penting, selain aspek ketersediaan dan pemanfaatan pangan, untuk memantapkan ketahanan pangan berkelanjutan. Kerawanan pangan terjadi tidak semata-mata karena ketidakcukupan pangan, akan tetapi lebih banyak disebabkan adanya gangguan akses pangan, sehingga individu/perorangan atau kelompok masyarakat tidak dapat mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup. Faktor-faktor yang mempengaruhi akses pangan masyarakat adalah: (1) Aspek fisik, yaitu kondisi ketersediaan pangan di tingkat wilayah, rumah tangga, maupun individu sebagai hasil produksi sendiri, masukan dari wilayah lain dan bantuan; (2) Aspek ekonomi, yaitu kemampuan masyarakat, rumah tangga, maupun individu secara

finansial untuk memperoleh pangan bagi kebutuhan rumah tangga, maupun individu; (3) Aspek sosial, yaitu hubungan formal maupun informal pada masyarakat yang berperan dalam kemampuan rumahtangga maupun individu untuk memperoleh pangan pada berbagai situasi, baik melalui pinjaman, pemberian dan bantuan.

Gangguan dalam akses pangan masyarakat yang tidak ditangani dengan baik, lambat laun akan menyebabkan terjadinya kerawanan pangan. Dari skala kejadiannya, kondisi rawan pangan dapat dikategorikan sebagai rawan pangan kronis dan rawan pangan transien. Kondisi rawan pangan transien bersifat mendadak dan sementara, yang apabila tidak segera ditangani dengan baik dapat mengarah kepada kondisi rawan pangan kronis.

Secara geospasial, Indonesia terletak di wilayah rawan bencana alam. Indonesia memiliki banyak gunung berapi, memiliki iklim tropis yang rawan terhadap banjir dan kekeringan. Bencana alam menyebabkan kerawanan pangan transien. Bencana alam yang berlanjut dalam skala luas di berbagai wilayah akan berdampak pada meningkatnya gangguan aksesibilitas pangan masyarakat. Di samping itu, bencana non alam seperti konflik sosial, kebakaran dan lain-lain, juga dapat menyebabkan terjadinya kerawanan pangan transien, yang jika tidak segera ditangani akan menjadi kerawanan pangan kronis.

Penanganan secara serius dan komprehensif sangat diperlukan terhadap kelompok masyarakat yang terdampak bencana dan kemungkinan akan mengalami masalah akses pangan. Untuk penanganan rawan pangan transien akibat aksesibilitas pangan terganggu diperlukan intervensi jangka pendek/tanggap darurat yang bersifat segera dengan pemberian bantuan pemerintah melalui dukungan program ketahanan pangan kepada kelompok masyarakat sasaran.

Untuk mengoptimalkan dan mensinergikan peran pemerintah, pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam penanganan pasca bencana melalui pemberian bantuan pemerintah kepada kelompok masyarakat sasaran, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat sebagai acuan bagi aparat pusat dan daerah.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat yang terkena dampak bencana melalui pemberian bantuan pemerintah. Adapun output yang diharapkan adalah tersalurkannya dana bantuan pemerintah untuk dukungan program ketahanan pangan kepada kelompok masyarakat yang terkena dampak bencana.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) **Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat** dilakukan dengan tujuan sebagai acuan bagi aparat pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan identifikasi, verifikasi dan intervensi pemberian bantuan pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat yang terdampak bencana.

b) Melakukan Identifikasi dan Verifikasi

(1) Verifikasi ke lokasi bencana Gunung Sinabung

- (a) Dilaksanakan dalam rangka sosialisasi dan identifikasi lokasi kegiatan peningkatan akses pangan masyarakat. Sosialisasi dilakukan kepada pejabat yang menangani kegiatan akses pangan di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo. Kegiatan peningkatan akses pangan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat yang terkena dampak bencana melalui pemberian bantuan program ketahanan pangan. Sasaran kegiatan ini adalah kelompok masyarakat yang terkena dampak bencana baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah terjadinya rawan pangan transien.
- (b) Berdasarkan hasil diskusi dengan provinsi dan kabupaten diputuskan untuk meninjau 2 lokasi yaitu di Siosar tempat relokasi korban bencana Sinabung dan Di Desa Kuta Rayat.

Hasil kunjungan ke Siosar sebagai berikut :

- Desa Siosar merupakan lokasi yang dibangun untuk menampung korban Gunung Sinabung yang telah diresmikan sejak Januari 2016, jumlah KK yang tinggal di Siosar sekitar 400 KK yang berasal dari tiga desa.
 - Setiap KK di Siosar telah memperoleh bantuan berupa rumah tinggal dan lahan pertanian seluas 0,5 hektar untuk kegiatan pertanian, dan sarana dan prasarana yang mendukung.
 - Berdasarkan peninjauan lokasi, Desa Siosar kurang tepat dijadikan sasaran kegiatan peningkatan akses pangan masyarakat. Sampai saat ini sudah banyak bantuan yang diterima seperti dari BNPB, Pemerintah Kabupaten Karo, Kemensos, dan juga dari swasta sehingga masyarakat sudah dapat melakukan aktivitas ekonomi kembali.
- (c) Hasil kunjungan ke Desa Kuta Rayat, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo :
- Desa Kuta Rayat berjarak 5 km arah utara dari Gunung Sinabung.
 - Desa Kuta Rayat pernah mengalami banjir lumpur vulkanik pada tahun 2014 yang menyebabkan 90persen lahan pertaniannya mengalami kerusakan karena tertutup lumpur vulkanik kurang lebih setebal 20 cm, kemudian masyarakatnya mengungsi dan baru mulai kembali ke rumahnya pada tanggal 11 Februari 2017.
 - Jumlah KK di desa Kuta Rayat berjumlah sekitar 600 KK.
 - Hingga saat ini masih sering terjadi hujan abu di Desa Kuta Rayat yang menyebabkan penurunan produksi tanaman sayuran.

- Untuk kegiatan peningkatan akses pangan masyarakat terdapat dua kelompok yang mengajukan sebagai calon kelompok yaitu Kelompok Tani Kentang Terakap dan Kelompok Tani Juma Lepar.
 - Kelompok Tani Kentang Terakap memiliki anggota sebanyak 27 orang dengan total luas lahan 11,67 Ha dan Kelompok Tani Juma Lepar beranggotakan 42 orang dengan total luas lahan sebesar 10 Ha. Masing-masing kelompok tersebut mengajukan rencana usaha kelompok (RUK) sebesar 100 juta per kelompok untuk budidaya tanaman kentang yaitu untuk pengolahan lahan, bibit tanaman, obat-obatan, pupuk, dan operasional.
- (d) Berdasarkan tinjauan lapang dan telaah terhadap RUK yang telah dibuat oleh kedua kelompok tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kedua kelompok juga kurang tepat sebagai calon penerima bantuan karena :
- Bencana hanya berdampak terhadap penurunan produksi hasil pertanian yang berdampak terhadap menurunnya pendapatan bukan menyebabkan hilangnya pendapatan sehingga tidak menyebabkan rawan pangan transien, sementara berdasarkan pedoman pelaksanaan kegiatan peningkatan akses pangan masyarakat, sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat yang mengalami rawan pangan transien.
 - Telaah terhadap RUK yang diajukan oleh kedua kelompok ditujukan untuk budidaya produksi tanaman kentang sehingga lebih tepat diberikan oleh instansi teknis terkait karena tidak diperuntukan untuk mencegah kerawanan pangan transien. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian pada pembiayaan usulan komponen pembiayaan yang kurang sesuai antara besarnya dana yang diajukan dengan luas lahan terutama untuk pembelian bibit dan pupuk.
 - Hasil konsultasi dengan Inspektorat Jenderal, disarankan untuk tidak melaksanakan kegiatan ini mengingat waktu yang sangat terbatas, dikhawatirkan apabila tetap dilaksanakan bantuan yang diberikan ke kelompok tidak termanfaatkan dengan benar.

(2) Identifikasi dan verifikasi ke lokasi bencana banjir dan organisme pengganggu tanaman di Kabupaten Karawang

Situasi dan kondisi di wilayah kabupaten yang dapat kami laporkan adalah sebagai berikut :

- a) Bencana Banjir di Bantaran sungai Citarum dan Cibeet
Kabupaten Karawang ada Kejadian Bencana banjir yang terjadi pada bulan Nopember 2017 yang lalu. Tingginya curah hujan di Jawa Barat dalam dua pekan membuat sungai Citarum dan Cibeet mulai naik dan meluap serta membuat permukiman di desa Karangligar diapit oleh dua sungai di

- Karawang Barat tergenang. Ketinggian air mencapai 50 sentimeter. Puluhan rumah mulai terendam dan warga mengungsi,
- b) Sekretaris Desa Karangligar Idoh Hodayatuloh melaporkan air mulai merendam di RT2 RW1 dan RT3 RW1 sekitar pukul 06.00 WIB. Setengah jam kemudian, tinggi air 20 sentimeter dan rumah warga. Ada 22 kepala keluarga dan 66 jiwa yang terdampak.
 - c) Direktur Pengelolaan Air Perum Jasa Tirta II Harry M Sungguh melaporkan air dari hulu Citarum yang masuk ke bendungan Jatiluhur cukup tinggi. mencapai 485 meter kubik per detik. Sementara yang keluar mencapai 220 meter kubik per detik. Kondisi masih memungkinkan untuk pengendalian banjir.
 - d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, menetapkan status siaga bencana saat musim penghujan ini. ada 10 kecamatan di wilayah ini yang masuk dalam daftar rawan bencana banjir. 10 kecamatan itu, berada di bantaran Citarum dan Cibeet yang sering meluap saat hujan deras turun.
 - e) Kepala BPBD Kabupaten Karawang, Banuara Nadeak, sudah mengirimkan surat imbauan kepada seluruh camat dan kepala desa yang lokasinya berada di dekat dengan kedua sungai tersebut. Termasuk hari ini, sudah ada pemberitahuan kepada masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Citarum dan Cibeet supaya waspada banjir. Karena Debit air kedua sungai, terutama Citarum sudah melebihi ambang batas.
 - f) Terkait bencana banjir tersebut Pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan antisipasi dengan melaksanakan stok pangan beras. Stok beras yang ada siap disalurkan apabila ada kejadian banjir dan siap untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir.
 - g) Puso akibat hama wereng coklat
Terjadi kerusakan pada tanaman padi yang disebabkan serangan hama wereng yang berakibat tanaman fuso. Kondisi pada pola tanam periode 16 s.d. 30 Nopember 2017, Luasan tanaman padi yang terdampak fuso yang tersebar di 22 kecamatan, dengan : 1) Sisa serangan 670 Ha; 2) Luas tambah serangan 613 Ha; 3) Luas keadaan serangan 1283 Ha; 4) Luas pengendalian dengan menggunakan pestisida 1826 Ha; 5) Luas pengendalian dengan menggunakan non pestisida 1930 Ha; 6) luas tanaman terancam 6415 Ha yang tertinggi di kecamatan Majalaya seluas 1027 Ha.

2) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Dalam Undang-undang Pangan Nomor: 18 Tahun 2012 ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kondisi tidak tercapainya ketahanan pangan maka disebut dengan kerawanan pangan. Kondisi kerawanan pangan dapat dilihat: (1) apabila rumah tangga (anggota rumah tangga) mengalami kurang gizi sebagai akibat tidak cukupnya ketersediaan pangan (*physical unavailability of food*), dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang cukup (*lack of social and economic access to adequate food*), dan (2) apabila konsumsi makanannya (food intake) berada dibawah jumlah kalori minimum yang dibutuhkan (< 70 persen AKG). Sedangkan Penyebab dari kerawanan pangan terdiri dari subsistem ketersediaan pangan, subsistem akses pangan, dan subsistem konsumsi pangan/pemanfaatan pangan.

Sampai tahun 2016, masih terdapat 12,69 persen dari seluruh penduduk di Indonesia yang mengalami kondisi sangat rawan pangan dan apabila dibiarkan terjadi selama dua bulan berturut-turut akan menjadi rawan pangan akut yang menyebabkan kelaparan.

Badan Ketahanan Pangan melalui Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan telah melakukan tahapan penanganan kerawanan pangan tersebut melalui berbagai kegiatan antara lain pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), dan Penyusunan Angka Rawan Pangan (ARP) yang diharapkan dapat dijadikan rekomendasi dalam kebijakan penanganan kerawanan pangan.

SKPG diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman SKPG. Dalam melaksanakan SKPG, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pangan dan Gizi yang berada di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Anggota Pokja Pangan dan Gizi Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, atau Dinas/Kantor/Badan/Unit Kerja lainnya yang terkait baik di Pusat, Propinsi maupun Kabupaten.

Kegiatan SKPG terdiri dari analisis data situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan serta penyebaran informasi. Analisis bulanan untuk aspek ketersediaan pangan menggunakan data luas tanam dan puso komoditas pangan utama sumber karbohidrat pada tahun berjalan dibandingkan dengan rata-rata data tersebut dalam lima tahun terakhir. Untuk aspek akses pangan, data yang dikumpulkan yaitu data komoditas harga pangan utama dan strategis pada bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata data tersebut selama tiga bulan terakhir. Untuk aspek pemanfaatan pangan digunakan pendekatan melalui data status gizi balita pada bulan berjalan.

Sedangkan untuk analisis tahunan merupakan akumulasi analisis bulanan yang menguraikan aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan.

Kegiatan SKPG di tingkat Pusat meliputi : Pertemuan penguatan kapasitas aparat dalam analisis SKPG, Koordinasi Tim Teknis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Penyusunan Buku SKPG Nasional.

a) Pertemuan penguatan kapasitas aparat dalam analisis SKPG

Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparat dalam melakukan analisis SKPG dilaksanakan pertemuan penguatan kapasitas aparat dalam analisis SKPG pada tanggal 11-13 April 2017 di Grand Tjokro, Bandung. Pertemuan dihadiri oleh pejabat/aparat yang berasal dari 31 provinsi, dan 63 kabupaten/kota. Metode pelaksanaan dari kegiatan ini adalah melalui pemaparan materi dan diskusi dengan tema: (i) pemanfaatan analisis SKPG dalam pengambilan kebijakan; (ii) SKPG sebagai Sistem Isyarat Dini dan Intervensi (SIDI); (iii) aplikasi SKPG berbasis web; dan (iv) praktek analisis SKPG secara *offline/online*. Selain itu sebelum dan sesudah pelaksanaan pertemuan dilaksanakan kegiatan Pretest dan Postest yang dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman peserta mengenai kegiatan SKPG. Dalam kesempatan tersebut Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membuka acara pertemuan sekaligus menyampaikan arahan sebagai berikut:

- (1) Kegiatan SKPG merupakan salah satu kegiatan BKP yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya penanganan kerawanan pangan yang memerlukan sinergitas lintas sektor terkait, sehingga perlu peningkatan peran lintas sektor sesuai dengan tugas dan fungsi instansi terkait, serta dukungan dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Pengelolaan SKPG menunjukkan perkembangan yang baik terutama dalam hal metode dan media analisis dan pelaporan. Aplikasi SKPG berbasis web diharapkan memberikan kemudahan bagi aparat pelaksana SKPG dalam melakukan analisis dan pelaporan secara cepat dan tepat.
- (3) Dalam rangka menyederhanakan mekanisme pelaporan, menyediakan penyimpanan data SKPG secara terpusat, serta memperluas pemanfaatan hasil analisa SKPG, telah disusun SKPG berbasis web yang diharapkan pengelolaan data SKPG menjadi lebih mudah dan tepat waktu untuk penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis SKPG.

Berdasarkan arahan, pemaparan, diskusi dan praktek analisis serta pelaporan SKPG dihasilkan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) SKPG merupakan instrumen/alat deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi suatu wilayah secara teratur dan terus menerus yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagi penentuan kebijakan, perencanaan program dan penetapan tindakan dalam penanganan masalah pangan dan gizi.
- (2) Dalam upaya mencegah kejadian kerawanan pangan dan gizi, perlu dilakukan kegiatan SKPG dengan menetapkan Tim/Pokja SKPG secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- (3) Hasil analisis SKPG diharapkan bermanfaat sebagai bahan rekomendasi suatu sistem pengambilan keputusan (decision making system) melalui tahapan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, koordinasi lintas sektor terkait serta investigasi sehingga dapat digunakan untuk penanganan/intervensi yang dibutuhkan.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan SKPG terdapat beberapa permasalahan yaitu: (a) SDM/aparat pelaksana SKPG yang sering mengalami mutasi; (b) kapasitas aparat pelaksana SKPG bervariasi sehingga diperlukan penyamaan persepsi dan peningkatan kapasitas; (c) terjadinya perubahan nomenklatur organisasi pemerintah daerah; (d) belum efektifnya Tim/Pokja SKPG; (e) tindak lanjut hasil rekomendasi SKPG yang belum disertai dengan kegiatan/anggaran penanganan kerawanan pangan; (f) ketersediaan data yang akurat dan real time; dan (g) ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan SKPG yang terbatas.
- (5) Upaya penanganan kerawanan pangan dilaksanakan melalui berbagai program baik sifatnya pencegahan maupun program penanganan jangka panjang antara lain melalui kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dan Lumbung Pangan Masyarakat dan kegiatan terkait lainnya.
- (6) Berdasarkan penilaian pre-test dan post-test baik secara offline dan online menghasilkan kesimpulan: (a) Peserta yang memahami materi dan simulasi dengan klasifikasi tinggi sebanyak 14.47 persen, klasifikasi sedang sebanyak 84.87 persen dan klasifikasi rendah sebanyak 0.66 persen.
- (7) Penilaian kegiatan SKPG secara online dilakukan pada beberapa aspek lainnya yaitu: (a) berdasarkan data peserta, sebanyak 60 persen peserta belum pernah mengikuti pelatihan SKPG dan 40 persen lainnya sudah pernah mengikuti pelatihan SKPG; (b) berdasarkan data peserta pertemuan, sebanyak 89.2 persen sudah memiliki id pengguna aplikasi SKPG, sedangkan lainnya (10.78 persen) membuat id pengguna pada saat pertemuan dilaksanakan; (c) peserta yang sudah pernah melakukan akses website SKPG sebesar 83.17 persen, sedangkan lainnya (16.83 persen) mengakses website pada saat kegiatan dilaksanakan; (d) peserta kegiatan menyampaikan bahwa penggunaan aplikasi SKPG berbasis web lebih mudah, praktis dan cepat.

b) Koordinasi Tim Teknis/Tim Pokja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Tim Teknis/Pokja SKPG dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Nomor 110.1/Kpts/Ot.050/J.2/02/2017 tentang Tim Teknis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun Anggaran 2017 yang beranggotakan K/L lintas sektor: Kementerian PPN/ Bappenas Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB); Pusat Data dan Informasi dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Koordinasi Tim Teknis/Tim Pokja SKPG Pusat dilaksanakan melalui telephone/email untuk memperoleh data yang diperlukan, sedangkan pertemuan pertama yang dilaksanakan pada tahun 2017 dilaksanakan dalam rangka membahas perkembangan pelaporan SKPG semester I tahun 2017 dan rencana penyusunan laporan SKPG nasional tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2017 di Ruang Rapat Nusantara I, Gedung E lantai II Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian. Rapat dihadiri oleh anggota Tim Teknis Gizi dari: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pusdatin Kementerian Pertanian; dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Berdasarkan paparan dan diskusi dapat dihasilkan simpulan sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan analisis SKPG pada tingkat provinsi pada bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2017, secara umum menunjukkan bahwa:
 - Kondisi rentan pangan aspek ketersediaan pangan pada bulan Januari-Juni dipengaruhi oleh luas puso padi yang lebih besar (diatas 5 persen) dibandingkan dengan rata-rata luas puso padi lima tahun sebelumnya. Pada bulan Januari terdapat 10 provinsi, bulan Februari terdapat 13 provinsi, bulan Maret terdapat 18 provinsi, bulan April terdapat 13 provinsi, bulan Mei terdapat 14 provinsi, dan bulan Juni terdapat 14 provinsi dengan luas puso padi diatas 5 persen. Sedangkan luas puso jagung, ubi kayu dan ubi jalar pada enam provinsi (NTT, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua) berpengaruh terhadap kondisi rentan pangan karena luas puso pada bulan Januari-Juni dibandingkan rata-rata luas puso lima tahun sebelumnya diatas 5 persen terutama luas puso jagung yaitu pada bulan Januari terdapat 16 provinsi, bulan Februari terdapat 18 provinsi, bulan Maret terdapat 18 provinsi, bulan April terdapat 12 provinsi, bulan Mei terdapat 15 provinsi, dan bulan Juni terdapat 14 provinsi dengan luas puso diatas 5 persen.
 - Pada aspek Akses Pangan secara umum menunjukkan kondisi aman (untuk harga beras kenaikan harga bulan berjalan dibandingkan rata-rata harga tiga bulan sebelumnya antara 4-7 persen, dan jagung, ubi kayu, ubi jalar kenaikan harga bulan berjalan dibandingkan rata-rata harga tiga bulan sebelumnya antara 5-10 persen.
- (2) Pusdatin Kementerian Pertanian saat ini mempunyai sistem pelaporan data yang dapat digunakan pada aspek ketersediaan melalui Simotandi yang diolah data satelit Landsat 8. Satelit tersebut membantu dalam penyediaan data fase budidaya tanaman padi yaitu dari fase Bera, Penggenangan Tanam (1 - 15 HST), Vegetatif 1 (16 - 30 HST), Vegetatif 2 (31 - 40 HST), Maks. Vegetatif (41 - 54 HST), Generatif 1 (55 - 71 HST), Generatif 2 (72 -

110 HST), Panen, dan Standing Crop. Ketersediaan data tersebut rutin dan memungkinkan untuk digunakan sebagai alternatif data SKPG khususnya untuk data luas tanam bulanan. Selain data luas tanam bulanan, fase pertumbuhan lainnya dapat digunakan sebagai data prediksi bulan selanjutnya dan Pusdatin siap membantu dalam penyediaan data secara rutin.

- (3) Hal penting yang disepakati adalah Anggota Tim/Pokja akan mendukung dalam ketersediaan data yang rutin, namun demikian perlu upaya peningkatan koordinasi dalam ketersediaan data secara tepat waktu. Data tersebut yaitu:

Tabel 12. Dukungan Data SKPG anggota Tim/Pokja SKPG

NO	INSTANSI	DATA ANALISIS
1	Pusdatin Kementerian Pertanian	Luas tanam dan Luas puso (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar tersedia bulanan dan akan disampaikan secara berkala
2	Kementerian Perdagangan	Ketersediaan data harga pada tingkat kabupaten/kota akan dikoordinasikan dengan propinsi
3	Kementerian Kesehatan	Data balita tahun 2017 belum tersedia ditingkat pusat dan akan diupayakan oleh Kementerian Kesehatan

c) Penyusunan SKPG Nasional

Penyusunan SKPG Nasional 2017 dilaksanakan dengan melakukan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui SKPG bulanan dari Januari sampai dengan Desember 2017. Analisis dilakukan berdasarkan indikator SKPG yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu aspek ketersediaan, aspek akses, dan aspek pemanfaatan pangan. Indikator aspek ketersediaan pangan adalah data luas tanam dan puso komoditas pangan utama sumber karbohidrat pada tahun berjalan dibandingkan dengan rata-rata data tersebut dalam lima tahun terakhir. Pada aspek akses pangan, data yang dikumpulkan yaitu data komoditas harga pangan utama dan strategis pada bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata data tersebut selama tiga bulan terakhir. Sedangkan aspek pemanfaatan pangan digunakan pendekatan melalui data status gizi balita pada bulan berjalan.

Kegiatan penyusunan SKPG nasional 2017 telah dilaksanakan di Hotel D'Ananya Bogor pada tanggal 3-5 Desember 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh petugas yang menangani SKPG di Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan BKP khususnya Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan, Pejabat Fungsional Analisis Ketahanan Pangan (AKP) serta narasumber yang terkait.

Berdasarkan analisis didapatkan hasil sebagai berikut:

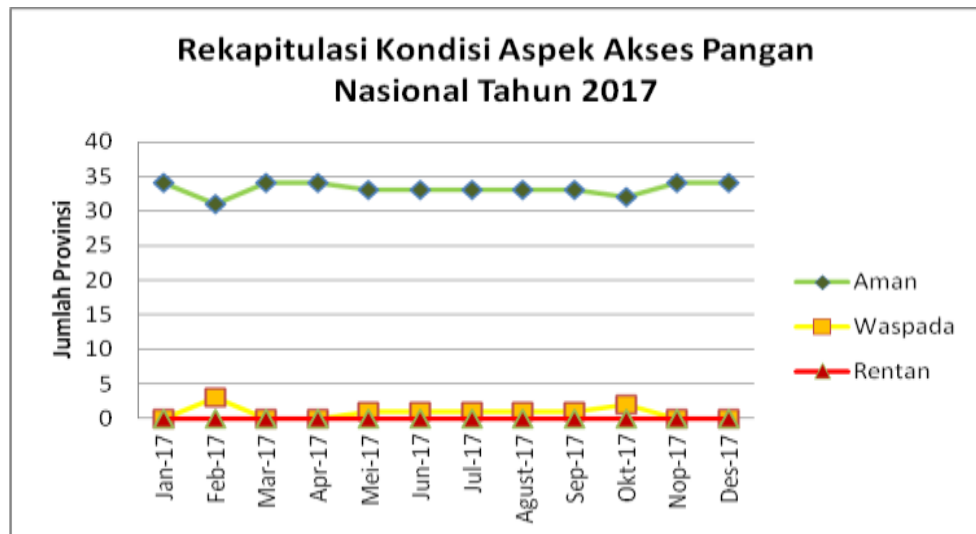
- Aspek Ketersediaan Pangan

Berdasarkan pengolahan dan analisis data pada aspek ketersediaan bulan Januari sampai Desember 2017 maka dihasilkan analisis sebagai berikut:

- Bulan Januari 2017 terdapat 5 provinsi (14,71 persen) masuk kategori aman, 22 provinsi (64,71 persen) masuk kategori waspada dan 7 provinsi (20,59 persen) masuk kategori rentan;
- Bulan Februari 2017 terdapat 14 provinsi (41,18 persen) masuk kategori aman, 11 provinsi (32,35 persen) masuk kategori waspada dan 9 provinsi (26,47 persen) masuk kategori rentan;
- Bulan Maret 2017 terdapat 11 provinsi (32,35 persen) masuk kategori aman, 19 provinsi (55,88 persen) masuk kategori waspada dan 4 provinsi (11,76 persen) masuk kategori rentan;
- Bulan April 2017 terdapat 6 provinsi (17,65 persen) masuk kategori aman, 21 provinsi (61,76 persen) masuk kategori waspada dan 7 provinsi (20,59 persen) masuk kategori rentan;
- Bulan Mei 2017 terdapat 10 provinsi (29,41 persen) masuk kategori aman, 16 provinsi (47,06 persen) masuk kategori waspada dan 8 provinsi (23,53 persen) masuk kategori rentan;
- Bulan Juni 2017 terdapat 2 provinsi (5,88 persen) masuk kategori aman, 16 provinsi (47,06 persen) masuk kategori waspada dan 16 provinsi (47,06 persen) masuk kategori rentan;
- Bulan Juli 2017 terdapat 15 provinsi (44,12 persen) masuk kategori aman, 13 provinsi (38,12 persen) masuk kategori waspada dan 6 provinsi (17,65 persen) masuk kategori rentan;
- Bulan Agustus 2017 terdapat 18 provinsi (52,94 persen) masuk kategori aman, 14 provinsi (41,18 persen) masuk kategori waspada dan 2 provinsi (5,88 persen) masuk kategori rentan;
- Bulan September 2017 terdapat 14 provinsi (41,18 persen) masuk kategori aman, 17 provinsi (50 persen) masuk kategori waspada dan 3 provinsi (8,82 persen) masuk kategori rentan;
- Bulan Oktober 2017 terdapat 18 provinsi (52,94 persen) masuk kategori aman, 12 provinsi (35,29 persen) masuk kategori waspada dan 4 provinsi (11,76 persen) masuk kategori rentan;
- Bulan November 2017 terdapat 3 provinsi (8,82 persen) masuk kategori aman, 20 provinsi (58,82 persen) masuk kategori waspada dan 11 provinsi (32,35 persen) masuk kategori rentan;
- Bulan Desember 2017 terdapat 2 provinsi (5,88 persen) masuk kategori aman, 15 provinsi (44,12persen) masuk kategori waspada dan 17 provinsi (50 persen) masuk kategori rentan.

- Aspek Akses Pangan

Berdasarkan hasil pemantauan SKPG Tahun 2017 pada aspek akses pangan, secara umum kondisi akses pangan di Indonesia sepanjang tahun 2017 dalam kondisi aman, hanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dalam kondisi waspada, Provinsi Bengkulu pada bulan September dalam kondisi waspada, Lampung pada bulan Oktober dalam kondisi waspada, dan Gorontalo pada bulan Februari dan Oktober dalam kondisi waspada, sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2017 dalam kondisi waspada (hasil pemantauan SKPG dapat dilihat pada Gambar berikut



Gambar 1. Rekapitulasi Kondisi Aspek Akses Pangan Bulanan Secara Nasional Tahun 2017

- Aspek Pemanfaatan Pangan

Berdasarkan analisis data pada aspek pemanfaatan pangan bulanan secara nasional tahun 2017 (Gambar 2), sebagian besar provinsi dalam kondisi waspada (51 persen). Kondisi aman pangan sebanyak 48 persen, dan kondisi rentan pangan sebanyak 1 persen. Provinsi mayoritas dalam kondisi aman hanya ditemui pada Bulan April, Mei, dan Juni.



Gambar 2. Rekapitulasi Kondisi Aspek Pemanfaatan Pangan Bulanan Secara Nasional Tahun 2017

Hasil rekapitulasi kondisi aspek pemanfaatan pangan perprovinsi dari Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017 adalah provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku merupakan 10 (sepuluh) provinsi yang stabil masuk kategori aman pada aspek pemanfaatan pangan bulannya. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI.Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua adalah 13 (tiga belas) provinsi yang statis masuk kategori waspada. Sedangkan Propinsi Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat adalah 10 (sepuluh) provinsi yang kondisi pemanfaatan pangan nya berubah dari aman ke waspada atau sebaliknya.

Perubahan kondisi aspek pemanfaatan dari kategori aman ke waspada disebabkan karena ada permasalahan pada aspek ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengakses pangan yang menyebabkan Balita pada wilayah tersebut mengalami gangguan masalah pangan. Namun demikian, hal tersebut belum menimbulkan masalah, namun tetap perlu waspada pada kondisi tersebut. Sedangkan perubahan kondisi aspek pemanfaatan pangan dari waspada ke tahan pangan terjadi karena ada perbaikan dalam hal jumlah ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengakses pangan nya. Provinsi Papua Barat merupakan satu-satunya provinsi yang masuk kondisi rentan aspek pemanfaatan pangannya, yakni pada Bulan Juni. Dari hasil analisis Pemantauan Situasi Pangan dan Gizi melalui SKPG, terlihat hubungan bahwa kondisi pemanfaatan pangan bulan berjalan dipengaruhi

oleh kondisi aspek ketersediaan pangan 4 bulan sebelumnya. Kondisi merah atau kategori rentan pada Bulan Juni di Provinsi Papua Barat dipengaruhi oleh aspek ketersediaan pangan Provinsi Papua Barat pada Bulan Februari.

Berdasarkan hasil pemantauan Pemantauan Situasi Pangan dan Gizi melalui SKPG tahun 2017, maka dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

- Pada provinsi yang mengalami rentan pada aspek ketersediaan pangan terutama Provinsi Papua, perlu ditingkatkan lagi program pemberian bantuan benih, pupuk dan alsintan terutama pada Bulan Januari, Februari, April, Mei, dan Juni;
- Perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam rangka stabilisasi harga terutama untuk harga pangan pokok, sehingga wilayah yang masuk kategori aman tetap stabil pada kondisi aman, dan yang waspada tidak menjadi rentan. Salah satu propinsi yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk pengendalian harga pangan pokok, adalah Propinsi NTT terutama pada Bulan Mei sampai Agustus 2017;
- Provinsi Papua Barat perlu mendapatkan perhatian khusus untuk aspek pemanfaatan pangan, terutama Bulan Juni 2017;
- Salah satu penyebab kondisi rentan pada aspek pemanfaatan adalah adanya masih adanya Balita yang BGM, hal tersebut sangat dimungkinkan karena faktor kemiskinan, dimana terdapat sekitar 27,77 juta (10,64persen) penduduk miskin di Indonesia. Untuk itu perlu adanya program yang kreatif dan inovatif dari pemerintah untuk pembangunan Indonesia agar dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Selain itu perlu upaya yang lebih giat untuk meningkatkan fungsi posyandu di setiap desa, guna memperbaiki kondisi aspek pemanfaatan pangan.
- Perlu kerjasama lintas sektor untuk membuat status pangan dan gizi Indonesia berada pada kondisi aman.

3) Penyusunan Angka Rawan Pangan (ARP)

Dalam rangka pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) goal 2 yaitu "*End Hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*" yang akan dicapai pada Tahun 2030, maka Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa salah satu indikator penting untuk tercapainya SDG's Goal 2 adalah berkurangnya penduduk rawan pangan sebesar satu persen per tahun. Sebagai tindak lanjutnya, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan melaksanakan kegiatan Penyusunan Angka Rawan Pangan (ARP) setiap tahun dalam rangka untuk mengetahui perkembangan penurunan penduduk rawan pangan sehingga dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam penanganan kerawanan pangan.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan ARP adalah: Rapat penyusunan ARP, Rapat/Koordinasi ARP, Penyusunan Angka Rawan Pangan Tahun 2017 (sementara), dan Penyusunan Buku Angka Rawan Pangan Tahunan.

a) Rapat Penyusunan ARP

Kegiatan rapat penyusunan ARP tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Rapat pertama untuk membahas metode dan pendekatan penyusunan buku Angka Rawan Pangan (ARP) tahun 2017 pada tanggal 3 Februari 2017. Rapat kedua untuk membahas perhitungan Analisis *Prevalence of Undernourishment* (PoU) secara mendetail dengan bentuk workshop pada tanggal 10-11 Agustus 2017.

(1) Rapat Penyusunan ARP I; dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2017 di Ruang Rapat Nusantara III, Gedung E Lantai 2 Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pangan dengan dihadiri: (1) Kepala Bidang Kerawanan Pangan; (2) Kepala Sub Direktorat Statistik Rumah Tangga, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik; (3) Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan; (4) fungsional Analis Ketahanan Pangan; dan (5) staf Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan BKP Kementan. Berdasarkan hasil rapat dan diskusi dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Sejak tahun 2011 telah dilaksanakan penyusunan Angka Rawan Pangan (ARP) melalui kerjasama antara BKP dan BPS dengan sumber data dari Susenas BPS berdasarkan pangsa pengeluaran dan konsumsi pangan dengan jumlah kecukupan energi 2000 kkal/hari sesuai dengan WNPG VIII tahun 2004. Data ARP nasional tahun 2016 menunjukkan penurunan sebesar 0.27 persen dibanding tahun 2015 yaitu dari 12,96 persen menjadi 12,69 persen.
- Dalam perkembangannya berdasarkan hasil WNPG X tahun 2012 dan diperkuat oleh Permenkes No. 75 tahun 2013 jumlah kecukupan energi menjadi 2.150 kkal/hari, sehingga memberikan implikasi terhadap perhitungan ARP.
- Selanjutnya dalam rangka memantapkan perhitungan ARP, akan dilakukan pendalaman terdapat empat metode dan pendekatan perhitungan ARP yaitu: (i) perhitungan berdasarkan AKG 2000 kkal/hari; (ii) perhitungan berdasarkan AKG 2150 kkal/hari; (iii) perhitungan berdasarkan salah satu indikator SDG's oleh Bappenas menggunakan *Prevalence of Undernourishment (PoU)* berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh FAO; (iv) perhitungan berdasarkan *Food Insecurity Experience Scale (FIES)* berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh FAO.

- Selanjutnya kegiatan Penyusunan Buku Angka Rawan Pangan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan membentuk Tim Penyusun dan Perjanjian Kerjasama antara BKP dan BPS.
- (2) Rapat penyusunan ARP II; dimaksudkan untuk membahas dan melakukan perhitungan Analisis *Prevalence of Undernourishment* (PoU) pada tanggal 10-11 Agustus 2017 yang dilaksanakan dalam bentuk workshop yang diadakan di Ruang Rapat Nusantara I BKP Kementan. Workshop dihadiri oleh: (1) BPS; (2) Tim Penyusunan Buku Angka Rawan Pangan; dan (3) peserta dari lingkup BKP dengan didampingi oleh Trainer workshop FAO yaitu dari FAO Regional Asia dan Pasifik, Mr. Abdul Sattar dan Mr. Tareq Abu El Haj serta dari FAO Roma melalui konferensi video *skype* yaitu Carlo Cafeiro. Berdasarkan hasil workshop tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Indikator PoU digunakan untuk memonitor *trend* atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional. Konsep PoU ini memungkinkan untuk mengestimasi kondisi kekurangan pangan yang parah dalam jumlah populasi yang besar, sehingga indikator ini digunakan untuk mengukur target menghilangkan kelaparan secara global.
 - Dalam mengukur PoU memperhitungkan 4 parameter yaitu: (i) *Dietary Energy Consumption/DEC*; (ii) *Coefficient of Variation/CV*, dan (iii) *Skewness* yang ketiganya menggambarkan distribusi tingkat konsumsi energi biasanya dari suatu populasi; serta (iv) *Minimum Dietary Energy Requirement/MDER* yang menentukan batas terendah dari kisaran kebutuhan energi normal rata-rata individu. Distribusi konsumsi energi biasanya dari suatu populasi dapat dianalisa secara statistik dari data konsumsi makanan, sedangkan MDER dapat dianalisa berdasarkan data tinggi badan populasi suatu negara; indeks masa tubuh dan *weight gain* menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan referensi FAO/WHO/UNU *joint expert consultation*;
 - Adapun sumber data analisis PoU adalah: (i) Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenast) untuk Data konsumsi pangan dan pengeluaran rumah tangga dan Data Neraca Bahan Makanan/*Food Balance Sheet*; (ii) Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian: Data Neraca Bahan Makanan/*Food Balance Sheet*; (iii) Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) untuk Data tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin, SKMI/SDT untuk Data asupan energi individu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan (iv)

FAO/WHO/UNU *joint expert consultation*: data referensi standard internasional tentang Index Masa Tubuh dan *weight gain*.

- Pada prinsipnya untuk menghitung PoU data yang diperlukan adalah data konsumsi makanan dari sampel populasi, untuk memperkirakan proporsi jumlah penduduk yang mengkonsumsi jumlah makanan sangat rendah sehingga tidak mampu menyediakan energi yang cukup untuk menjalankan kehidupan aktif yang sehat. Permasalahan utama dalam perhitungan PoU adalah perolehan data di lapangan yang masih banyak terkendala.
- Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan data Susenas mengenai *cut off* nilai angka rawan masih terjadi over estimasi PoU. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab adalah: (i) kondisi data pengeluaran untuk makanan yang dilaporkan oleh Susenas (pelaksanaan survey dilapang); (ii) metode dan teknis perhitungan yang belum sesuai. Hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan koordinasi teknis antara BPS dan konsultan FAO untuk memastikan ketepatan data yang selanjutnya akan dilakukan analisis perhitungan PoU.
- BKP dan BPS akan menyusun agenda dan tahapan yang lebih detail dalam penyusunan Angka Rawan Pangan dengan metode PoU, khususnya mengenai tahapan analisis dan penyusunan laporan hasil analisis.

b) Rapat/Koordinasi ARP

Kegiatan rapat/koordinasi dilaksanakan untuk: (1) pengumpulan data dan informasi yang diperlukan mengenai ketahanan dan kerawanan pangan pada instansi/kementerian/ lembaga/dinas/badan yang terkait dengan ketahanan dan kerawanan pangan; (2) mengkonsultasikan isu-isu mengenai ketahanan dan kerawanan pangan dengan instansi/kementerian/ lembaga/dinas/badan yang terkait dengan ketahanan dan kerawanan pangan.

Kegiatan rapat/koordinasi tahun 2017 ini dilaksanakan 3 (tiga) kali dengan FAO, yaitu pada tanggal 7 Agustus, 20 September, dan 27 Oktober 2017. Berikut uraian lengkap dari setiap rapat/koordinasi:

- (1) Rapat/koordinasi I; dilaksanakan di Ruang Rapat Nusantara I BKP Kementan, pada tanggal 7 Agustus 2017. Rapat/koordinasi I ini merupakan kegiatan yang mengawali rapat penyusunan ARP II berupa workshop PoU. Acara dihadiri oleh: FAO Representative Indonesia, Mark Smulders; WFP Indonesia Pusdatin Bappenas; BPS; perwakilan dari sekretariat SDGs; Tim Penyusunan Buku Angka Rawan Pangan; dan peserta dari lingkup BKP. Berdasarkan hasil rapat/koordinasi dalam pembukaan workshop analisis PoU, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Acara *workshop* Analisis *Prevalence of Undernourishment* (PoU) didahului oleh sambutan oleh FAO Representative Indonesia, Mark Smulders dengan menyampaikan: (i) tujuan diadakan *workshop* ini adalah untuk menyamakan persepsi mengenai angka rawan pangan di Indonesia, sehingga angka rawan pangan yang tersusun nantinya merupakan kesepakatan bersama *stakeholder* terkait; (ii) FAO sebagai pendamping dalam implementasi SDG's di Indonesia khususnya mengenai penurunan kekurangan pangan (*zero hunger*) memberikan apresiasi dan penghargaan yang besar atas peran BKP Kementan dalam menindaklanjuti salah satu target SDG's melalui penyusunan Buku Angka Rawan Pangan (ARP) menggunakan metode *Prevalence of Undernourishment* (PoU) yang merupakan salah satu indikator capaian SDG's.
 - Penyusunan indikator SDG's merupakan tindaklanjut dari pencapaian MDG's. Penyusunan indikator tersebut berdasarkan hasil pembahasan di Komisi Statistik PBB dimana menghasilkan 230 indikator. Selanjutnya berdasarkan pertemuan perwakilan Badan Statistik dari 28 negara yang mewakili seluruh wilayah anggota PBB menyusun indikator SDG's. Berdasarkan pembahasan maka dihasilkan 17 tujuan dengan 169 capaian dan 230 indikator dari SDG's.
 - Salah satu tujuan SDG's adalah penurunan kekurangan pangan (*zero hunger*) sampai 0 persen pada tahun 2030. Berkaitan dengan poin tersebut, salah satu indikator dalam SDG's yang dipakai dalam perhitungan Angka Rawan Pangan adalah SDG target 2.1 Indikator 2.1.1 *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi dari suatu penduduk, di mana konsumsi pangan sehari-hari tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Secara singkat dapat diartikan sebagai probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi pangan yang kurang dari kebutuhan energinya;
- (2) Rapat/koordinasi II, dilaksanakan pada tanggal 20 September 2017 di Menara Thamrin Jakarta dengan dihadiri oleh: Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S.; Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Dr. Benny Rachman, APU; Representative FAO Indonesia, Mark Smulders; Perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP); Kepala Sub Direktorat Gizi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Entos, S.P., MPH; perwakilan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan; dan perwakilan dari

Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan rapat yang dilaksanakan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Review Perkembangan Angka Rawan Pangan (ARP), perubahan dan permasalahan saat ini merupakan proses yang terus berjalan. Menurut Sekretariat SDG's perkembangan perhitungan ARP terdapat permasalahan terutama dalam hal metodologi dan terjadi hampir semua negara. Adanya metodologi PoU dengan memperhitungkan kecukupan energi yang lebih rinci (mempertimbangkan aspek jenis kelamin, umur, indeks massa tubuh) dianggap lebih mewakili dan akurat. Di Indonesia pengenalan dan ujicoba perhitungan kecukupan energi dengan metode Prevalence of Undernourishment (PoU) telah dilakukan dengan workshop dan ujicoba penggunaan data yang sesuai yaitu menggunakan data Susenas BPS, Antropometri Balibangkes, Kemenkes, dan Neraca Bahan Makanan BKP dan BPS. Penggunaan data tersebut dianggap mewakili (300.000 sampel Susenas) dan sesuai dengan standar yang disyaratkan, meskipun secara hasil analisis terdapat fluktuasi nilai PoU;
- Badan Pusat Statistik telah melakukan ujicoba perhitungan PoU menggunakan data Susenas Maret 2017 dengan angka PoU sebesar 7,8 persen secara nasional. Namun perlu dilakukan perhitungan pada tingkat provinsi untuk mengetahui variasi nilai antar provinsi. Hal ini berkaitan dengan data tertentu yang dimungkinkan berpengaruh terhadap nilai PoU. Salah satu data tersebut adalah mengenai konsumsi bahan makanan jadi yang berbeda antar daerah. Hal lain adalah Susenas menggunakan metode recall konsumsi kalori selama seminggu terakhir rumahtangga, sehingga memerlukan ketelitian dalam proses pengambilan data;
- Data Antropometri yang digunakan dalam perhitungan PoU merupakan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan dan dilaksanakan setiap tiga tahun yaitu tahun 2007, 2010, dan 2013. Penggunaan data series Riskesdas tersebut bermanfaat dalam menentukan pola data sehingga dapat ditentukan data terbaik untuk penentuan PoU;
- Istilah hunger pada target SDG's perlu kesepakatan dan penyamaan persepsi. Secara konsep, istilah hunger diartikan sebagai kondisi ketidakcukupan energi sehingga berbeda pengertiannya dengan kelaparan atau starvation. Di Indonesia kondisi ketidakcukupan energi (kalori) selama ini menggunakan istilah rawan pangan, sehingga pada angka PoU yang akan dihasilkan perlu adanya kesepakatan mengenai istilah yang digunakan;
- Saat ini ada dua dasar penggunaan ambang batas atau Cut of Point (CoP) mengenai kecukupan kalori yaitu 2000 kkal (WNPG VIII 2004) dan

2150 kkal (Permenkes nomor 75 Tahun 2013), sehingga perlu ditelaah kembali nilai ambang batas tersebut kaitannya dengan capaian kinerja pemerintah. Hal lain adalah terkait dengan data Riskesdas tahun 2013 yang apabila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dinilai kurang sesuai berkenaan dengan capaian kinerja pemerintah tahun 2014-2015, sehingga adanya data Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas) tahun 2016 perlu dipertimbangkan;

- Berdasarkan rapat tersebut disepakati mengenai rencana tindaklanjut penyusunan Angka Rawan Pangan menggunakan metode PoU sebagai berikut: (i) Balitbangkes Kemenkes menyusun data Antropometri tahun 2007, 2010 dan 2013 dan ditargetkan selesai satu minggu (29 September 2017); (ii) Badan Pusat Statistik selanjutnya akan mengolah data Balitbangkes dalam penyusunan PoU dan ditargetkan selesai tiga minggu (minggu III Oktober 2017); (iii) Penyediaan data dalam penyusunan PoU dilakukan dengan koordinasi antara BPS dan instansi terkait; (iv) Data PoU yang dihasilkan selanjutnya dirumuskan dan disepakati bersama antara BKP Kementan, BPS, Kemenkes, Bappenas, dan Kantor Staf Presiden (KSP) dan selanjutnya diterbitkan dalam bentuk buku oleh BKP Kementan pada akhir November 2017.
- (3) Rapat/koordinasi III; dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2017, di Ruang Pertemuan FAO, Menara Thamrin Jakarta. Rapat/koordinasi III ini untuk membahas penyusunan angka *Prevalence of Undernourishment* (PoU) lebih lanjut. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari : (1) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat - Badan Pusat Statistik; (4) Balitbangkes -Kementerian Kesehatan; (6) FAO; dan (7) BKP – Kementerian Pertanian. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Pertemuan dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti pertemuan sebelumnya perihal Pembahasan Penyusunan Buku Angka Rawan Pangan (ARP) dimana disepakati akan dilakukan perhitungan Minimum Dietary Energy Requirement (MDER) dan Prevalence of Undernourishment (PoU) dengan sumber: data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan tahun 2010 dan 2013, data Susenas BPS (tahun 2011-2016), dan data Survei Konsumsi Makanan Individu (SKMI) tahun 2014;
 - Perhitungan MDER berdasarkan data Riskesdas dilakukan dengan menghitung populasi tinggi badan berdasarkan kelompok umur baik laki-laki dan perempuan dengan mengelompokkan kelompok umur menjadi 31 kelompok umur. Data Riskesdas yang dapat digunakan yaitu data tahun 2007, 2010, 2014 (SKMI). Selanjutnya menambahkan kebutuhan kalori untuk ibu hamil yaitu 210 Kkal dikalikan dengan Angka Kelahiran (Birth

- Rate). Selanjutnya dilakukan perhitungan PoU dengan menggunakan bantuan SPSS/Stata;
- Perhitungan angka PoU dilaksanakan dengan tahapan: (i) membuat piramida penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin; (ii) menghitung konsumsi kalori perkapita sehari; (iii) menghitung koefisien variasi dan data konsumsi kalori perkapita sehari; (iv) menghitung (MDER) dan koefisien variasi (CV); (v) menghitung total koefisien variasi (CV) dengan menjumlahkan koefisien variasi dan variable pembentuknya; (vi) menghitung PoU dengan membandingkan konsumsi kalori perkapita dengan MDER. Nilai PoU adalah banyaknya penduduk yang konsumsi kalornya dibawah MDER;
 - Berdasarkan data dan proses perhitungan diperoleh data bahwa dengan menggunakan data Riskesdas tahun 2010, Susenas BPS tahun 2011-2013 dan data Riskesdas tahun 2013, data Susenas BPS tahun 2014-2017 triwulan I diperoleh nilai PoU tahun 2011 sebesar 16,6 persen, tahun 2012 sebesar 26,04 persen, tahun 2013 sebesar 27,10 persen, tahun 2014 sebesar 23,42 persen, tahun 2015 sebesar 20,07 persen, tahun 2016 sebesar 17,50 persen dan tahun 2017 sebesar 7,91 persen dengan MDER sebesar 1.799 Kkal;
 - Hasil perhitungan PoU perlu di adjustment untuk perbaikan penghitungan kalori pada makanan dan minuman jadi (yang dikonsumsi yang diluar rumah) yang dilakukan dengan menggunakan informasi konsumsi kalori dan harga yang dikeluarkan pada komoditas-komoditas yang dikonsumsi;
 - Hasil perhitungan sementara tersebut akan didiskusikan kembali dengan TIM dan FAO sehingga dihasilkan kesimpulan mengenai data yang akan digunakan yang selanjutnya dijadikan rekomendasi sebagai angka PoU.

c) Penyusunan Angka Rawan Pangan Tahun 2017 (sementara)

Kegiatan Penyusunan ARP tahun 2017 (sementara) merupakan rangkaian kegiatan penyusunan ARP tahun 2017 sebagai bahan penyusunan Buku Angka Rawan Pangan Tahun 2017. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24-25 Mei 2017 di Hotel Izi Bogor dimaksudkan untuk membahas metodologi ARP. Kegiatan ini dihadiri oleh Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S., Drs. Wynandin Imawan, M.Sc (Badan Pusat Statistik), Dr. Farit Mochamad Afendi, S.Si, M.Si, (Institut Pertanian Bogor), Anggota Tim Penyusunan Buku Angka Rawan Pangan, perwakilan dari FAO dan WFP. Berdasarkan paparan dan diskusi dalam kegiatan ini, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penyusunan Buku Angka Rawan Pangan (ARP) merupakan tindak lanjut kerjasama antara BKP dan BPS yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2011. Penyusunan ARP dilaksanakan dalam bentuk data series dan belum didokumentasikan dalam bentuk buku. Oleh karena itu pada tahun 2017

direncanakan akan disusun buku ARP yang bertujuan agar dapat digunakan dan dipublikasikan secara luas;

- (2) Pembahasan penyusunan buku ARP dilaksanakan dengan penyampaian materi yaitu: (a) penentuan Cut Off Point (CoP) < 70persen AKG oleh Drs. Wynandin Imawan, M.Sc; (b) pengukuran kerawanan pangan menggunakan metode PoU dan FIES oleh Lina Rospita (FAO); (c) pembahasan oleh Prof. Dr.Ir. Achmad Suryana, MS, Dr. Farit Mochamad Afendi, S.Si, M.Si, dan Dedi Junadi (WFP);
- (3) Dalam perkembangannya terdapat beberapa hal yang menjadi pembahasan berkaitan dengan perhitungan dan Cut Off Point ARP yaitu: Permenkes Nomor 75 Tahun 2013 tentang AKG (Recommended Dietary Allowance) menetapkan 2.150 kkal/kapita/hari sebagai Angka Kecukupan Gizi atau naik dari AKG yang direkomendasikan sebelumnya yaitu 2.000 kkal/kapita/hari.
- (4) Perlu mempertimbangkan untuk merubah konversi dari komoditas ke energi secara as purchased (2.100 kkal/kapita/hari) menjadi as consumed (2.150 kkal/kapita/hari). Perubahan tersebut dapat berimplikasi menurunkan rata-rata asupan kalori dan perubahan konsumsi sehingga akan meningkatkan angka kemiskinan dan angka rawan pangan (ARP);
- (5) Perlu dikaji lebih lanjut dalam penentuan ARP terutama ARP berbasis Urban dan Rural;
- (6) FAO menyampaikan terdapat empat definisi konsep ketahanan pangan yaitu Ketahanan Pangan, Ketahanan Nutrisi, Ketahanan Pangan dan Kecukupan Nutrisi serta Ketahanan Pangan dan Nutrisi. Untuk pengukuran kerawanan pangan, perlu disepakati terlebih dahulu definisi konsep yang akan digunakan, sehingga indikator yang tersusun jelas dan sesuai. Konsep indikator yang baik dalam menentukan suatu metode pengukuran yaitu: (i) spesifik, indikator harus fokus untuk mengukur hanya apa yang dimaksudkan untuk diukur dan diformulasikan secara tepat; (ii) terukur, indikator harus layak diukur dengan cara yang tidak ambigu; (iii) tercapai, indikator harus masuk akal dan memungkinkan untuk dicapai atau realis; (iv) relevan, indikator harus bermakna dan terkait dengan keluaran dan hasil yang diinginkan; dan (v) dibatasi waktu, harus ada kerangka waktu di mana perubahan diukur;
- (7) Penyusunan indikator SDG's merupakan tindaklanjut dari pencapaian MDG's. Penyusunan indikator tersebut berdasarkan hasil pembahasan di Komisi Statistik PBB dimana menghasilkan 230 indikator. Selanjutnya berdasarkan pertemuan perwakilan Badan Statistik dari 28 negara yang mewakili seluruh wilayah anggota PBB menyusun indikator SDG's. Berdasarkan pembahasan maka dihasilkan 17 tujuan dengan 169 capaian dan 230 indikator dari SDG's;
- (8) Salah satu tujuan SDG's adalah penurunan kekurangan pangan (zero hunger) sampai 0 persen pada tahun 2030. Berkaitan dengan poin tersebut, indikator dalam SDG's yang bisa dipakai dalam perhitungan ARP adalah: (i) SDG target

2.1 Indikator 2.1.1 Prevalence of Undernourishment (PoU); dan (b) SDG target 2.1 Indikator 2.1.2 Food Insecurity Experience Scale (FIES). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah proporsi dari suatu penduduk, di mana konsumsi makanan sehari-hari tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Secara singkat dapat diartikan sebagai probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Food Insecurity Experience Scale (FIES) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase individu di populasi secara nasional yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau parah, setidaknya sekali dalam 12 bulan terakhir. Tingkat keparahan kerawanan pangan bersifat laten diukur berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (Food Insecurity Experience Scale/ FIES) berdasarkan referensi global;

- (9) BPS telah melakukan ujicoba perhitungan PoU berdasarkan data Susenas tahun 2016 dan menghasilkan angka 17 persen, sedangkan data ARP pada tahun 2016 adalah sebesar 12,69 persen. Perbedaan tersebut dimungkinkan karena perhitungan ARP berdasarkan nilai kalori rata-rata, tidak memperhatikan karakteristik anggota rumah tangga (kelompok umur, dan jenis kelamin, aktifitas). Sedangkan perhitungan PoU dilakukan berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan aktivitas anggota rumah tangga, sehingga lebih terinci dan memberikan gambaran yang tepat;
- (10) Selanjutnya berdasarkan pembahasan tersebut terdapat beberapa rekomendasi sebagai tindaklanjut rencana penyusunan Buku Angka Rawan Pangan:
- (11) Buku ARP Tahun 2017 memuat perhitungan: (a) ARP berdasarkan AKG sebesar 2000 kkal/kapita/hari; (b) data kecukupan konsumsi kalori berdasarkan PoU tahun 2011-2016. Penyajian data tersebut dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan capaian yang dihasilkan sehingga dapat dijadikan rekomendasi penyusunan Renstra selanjutnya;
- (12) Perhitungan data kecukupan kalori berdasarkan AKG sebesar 2.000 kkal/kapita/hari; dan PoU diharapkan selesai pada Bulan September 2017;
- (13) Penyusunan Buku ARP oleh Tim Penyusunan Buku Angka Rawan Pangan diharapkan selesai (final) pada bulan Desember 2017 dengan pendampingan dari FAO dan WFP;
- (14) Perlu dilakukan penyempurnaan metode dalam perhitungan PoU, khususnya mengenai data yang digunakan dan perhitungan yang dilakukan.

d) Penyusunan Buku Angka Rawan Pangan Tahunan

Kegiatan Penyusunan Buku ARP Tahunan dilaksanakan di Hotel Salak Tower Bogor pada tanggal 3-4 November 2017 dengan dihadiri: Dr.Ir.Drajat Martianto, MSc, IPB; Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS; Subbid Gizi Kesehatan Keluarga, Puslitbang Usaha Kesehatan Masyarakat Kemenkes; Bidang Kerawanan Pangan, BKP Kementan; dan FAO Indonesia. Berdasarkan hasil pertemuan penyusunan Buku ARP Tahunan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pertemuan Penyusunan Buku Angka Rawan Pangan (ARP)/*Prevalence of Undernourishment* (PoU) di Hotel Salak Tower membahas hasil perhitungan ARP/PoU tahun 2011-2017 oleh BPS dan konsep penulisan buku Angka Rawan Pangan (ARP). Kegiatan penyusunan buku ARP menurut FAO merupakan inisiatif yang sangat baik, sehingga Indonesia termasuk yang paling responsive dalam proses penyusunan buku ARP;
- (2) Pelaksanaan penyusunan Buku Angka Rawan Pangan (ARP)/*Prevalence of Undernourishment* (PoU) hendaknya memperhatikan beberapa hal yaitu: (1) perlu menegaskan bahwa PoU adalah Angka Rawan Pangan (ARP) sehingga tidak ada kerancuan dalam hal data; (2) definisi PoU diusulkan untuk dibahas dalam forum WNPG, sehingga menjadi definisi yang tetap dan menjadi acuan; (3) buku ARP dapat mengacu pada literatur atau referensi yang sudah dipublikasi secara internasional seperti definisi dan metodologi, sedangkan pada isi buku dapat disesuaikan dengan konteks Indonesia; dan (4) buku yang disusun dapat dipahami dan digunakan baik oleh pelaksana kebijakan maupun masyarakat secara umum;
- (3) Usulan yang disampaikan dalam penyusunan buku ARP/PoU antara lain: (a) judul buku ARP diusulkan adalah “Angka Kerawanan Pangan di Indonesia 2017: Sebuah **Analisis Untuk Kebijakan**”; (b) pembahasan PoU dapat dikaitkan dengan pilar ketahanan pangan atau menggunakan data susenas karena dapat digunakan untuk melihat karakteristik penduduk yang rawan pangan (demografi, pendidikan dan lain-lain) sehingga penjelasan akan lebih tepat dan penanganan kerawanan pangan dapat diarahkan pada karakteristik yang ada; (c) menggunakan data lain yang berfungsi sebagai data penjabar angka rawan pangan dan (e) mendiseminasikan hasil perhitungan ARP/PoU dengan dua format *Scientific* paper untuk disajikan dalam WNPG (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi) 2018 dan jurnal ilmiah terindeks scopus agar dapat dijadikan rujukan bagi akademisi/peneliti melalui suatu paper yang telah direview oleh *peer reviewer* di bidang ini.

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. Penyempurnaan FSVA Nasional dan Provinsi

Sejalan dengan pemekaran wilayah yang terjadi, perkembangan wilayah sebagai hasil pelaksanaan pembangunan serta ketersediaan data terbaru, maka pada tahun 2018 Badan Ketahanan Pangan berkepentingan untuk melakukan pemutakhiran FSVA Nasional dan Provinsi. Pemutakhiran ini dilakukan agar potret ketahanan pangan dapat digambarkan secara lebih akurat. Pemutakhiran dilakukan melalui penyempurnaan indikator, data, serta metode komposit. Beberapa kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan upaya penyempurnaan FSVA meliputi rangkaian pertemuan *Focus Group Discussion* (FGD) dan sosialisasi awal kepada aparat daerah. Adapun indikator yang mengalami perubahan dibandingkan dengan FSVA 2015 Nasional adalah pada aspek akses pangan terdapat penggantian indikator dari yang sebelumnya persentase desa dengan akses penghubung yang kurang memadai menjadi proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan terhadap pengeluaran total dan pada aspek pemanfaatan pangan, persentase perempuan buta huruf menjadi rata-rata lama sekolah perempuan serta persentase keluarga yang tinggal di desa dengan jarak lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan menjadi rasio tenaga kesehatan terhadap 100.000 penduduk. Sedangkan untuk metode analisis komposit FSVA 2018 menggunakan metode pembobotan. Dasar pembobotan adalah analisis *multivariate* (PCA/analisis komponen utama) dan *expert judgement*. Selain itu, perubahan lainnya adalah dimasukkannya wilayah perkotaan dalam cakupan analisis FSVA Nasional 2018 namun dengan sedikit perbedaan dalam perhitungan kompositnya dengan hanya menggunakan 2 aspek ketahanan pangan (aspek akses dan pemanfaatan pangan).

Secara ringkas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam penyempurnaan FSVA adalah sebagai berikut:

a. *Focus Group Discussion* (FGD) I

FGD I dilaksanakan pada tanggal 6-7 November 2017 di Hotel Salak Tower, Bogor. tujuan dari dilaksanakannya FGD I adalah untuk memastikan ketersediaan data SUSENAS dan PODES yang akan digunakan dalam penyusunan FSVA 2018. Narasumber dalam FGD adalah Direktorat Kesejahteraan Rakyat dan Direktorat Ketahanan Sosial, BPS. Beberapa poin penting hasil FGD I adalah:

- Dalam penyusunan FSVA 2018, beberapa data yang diperlukan bersumber dari BPS meliputi: data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) KOR dan KP, Potensi Desa (PODES) dan Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS).
- Diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan BPS untuk mendapatkan data SUSENAS KOR dan KP 2017 dengan cakupan tingkat kabupaten karena data tersebut baru akan dipublikasikan pada bulan Februari 2018. Sementara data SUSENAS KOR dan KP 2016 sudah dimiliki oleh BKP.

- Mengingat data PODES 2018 baru akan dipublikasikan pada bulan November 2018, maka diperlukan keputusan apakah akan tetap menggunakan PODES 2014 sebagaimana yang telah digunakan dalam FSVA 2015 atau mengganti dengan data dari sumber lainnya sebagai *proxy* (pendekatan).
- Untuk mengakomodasi analisis SAE, maka perlu dibentuk sebuah tim yang beranggotakan petugas yang menguasai tentang metodologi analisis SAE, data SUSENAS KOR dan KP serta SUPAS. Tim ini harus segera dibentuk mengingat proses analisis SAE akan memakan waktu yang panjang.

b. Focus Group Discussion (FGD) II

FGD II dilaksanakan pada tanggal 14-15 November 2017 di Hotel Sahira Butik, Bogor. Tujuan FGD II ini adalah penyiapan data yang terkait dengan data- aspek Ketersediaan Pangan untuk penyusunan FSVA 2018. Narasumber dalam FGD adalah Pusat Data dan Informasi Pertanian dan Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Adapun hasil/tindak lanjut FGD tersebut adalah:

- Pusdatin akan mengolah data produksi padi, jagung ubi kayu dan ubi jalar per kabupaten tahun 2016 serta data produksi di tingkat kecamatan untuk tiga tahun terakhir. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam penyusunan FSVA 2018.
- Tim FSVA akan melakukan validasi data produksi yang sudah diperoleh dari Pusdatin dengan cara membandingkannya dengan data produksi dari BPS yang dipublikasikan melalui DDA.
- Mereview kembali nilai konsumsi normatif karbohidrat per kapita sehari dimana pada FSVA 2015 nilainya adalah 300 gram/kapita/hari. Informasi nilai konsumsi normatif tersedia di Bidang Konsumsi Pangan, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Selain itu, diperlukan juga mereview nilai konversi dari produksi kotor ke produksi bersih serta nilai konversi benih, susut dan tercecercer komoditas padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Informasi tersebut tersedia di Bidang Data Non Komoditas, Pusdatin.

c. Focus Group Discussion (FGD) III

FGD ketiga dilaksanakan pada tanggal 21-22 November 2017 di Hotel Anaya, Bogor. Tujuan FGD III adalah Penyiapan Data FSVA 2018 Aspek Pemanfaatan Pangan. Narasumber dalam FGD adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Direktorat Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan. Adapun hasil/tindak lanjut FGD tersebut adalah:

- Kementerian Kesehatan melakukan beberapa kegiatan survey atau riset, antara lain Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Pemantauan Status Gizi (PSG). Riskesdas dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada tahun 2007, 2010 dan 2013. Riskesdas terbaru direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018. Data Riskesdas disajikan sampai tingkat kabupaten. Sementara, PSG dilaksanakan setiap tahun oleh Direktorat Gizi Masyarakat sejak tahun 2014 dengan

cakupan tingkat kabupaten. Data PSG tahun 2017 sudah tersedia di Direktorat Gizi Masyarakat.

- Untuk mendapatkan data PSG 2017, BKP dapat mengirim surat permintaan data ke Direktorat Gizi Masyarakat.
- Mengingat data PSG 2017 sudah tersedia dan Riskesdas terbaru direncanakan baru akan dilaksanakan pada tahun 2018, maka diperlukan keputusan apakah indikator balita stunting akan menggunakan data PSG 2017 atau tetap menggunakan Riskesdas 2013.
- Diperlukan keputusan apakah indikator persentase desa dengan jarak lebih dari 5 Km dari fasilitas kesehatan akan diganti dengan indikator rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk mengingat data Podes terbaru baru akan tersedia pada tahun 2019 sementara data tenaga kesehatan tahun 2016 sudah tersedia.

d. Focus Group Discussion (FGD) IV

Focus Group Discussion keempat dilaksanakan pada tanggal 5-6 Desember 2017 di Hotel Mirah, Bogor. Tujuan FGD IV adalah membahas Metodologi FSVA (*cut-off point* indikator individu dan metode analisis komposit) 2018. Narasumber dalam FGD adalah Dr. Ir. Drajat Martianto dan Dr. Farit M. Afendi dari IPB. Beberapa poin penting hasil/tindak lanjut FGD tersebut adalah:

- Analisis komposit berguna untuk merangkum data dari 9 indikator individu sehingga menjadi satu kesatuan kesimpulan tentang status ketahanan dan kerentanan terhadap kerawanan pangan di suatu wilayah. Metode analisis komposit FSVA 2018 menggunakan metode pembobotan yang merupakan pengkalian antara bobot indikator individu yang dihasilkan dari Analisis Komponen Utama (Principal Component Analysis – PCA) atau hasil dari kesepakatan ahli dengan *cut-off point* indikator individu yang bersangkutan.
- Perhitungan komposit antara wilayah kabupaten dan perkotaan akan dibedakan, mengingat kedua wilayah tersebut memiliki karakteristik ketahanan pangan yang berbeda. Perhitungan komposit untuk wilayah kabupaten menggunakan seluruh aspek ketahanan pangan FSVA (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan) sedangkan wilayah perkotaan hanya menggunakan 2 aspek ketahanan pangan (aspek akses dan pemanfaatan pangan). Aspek ketersediaan pangan (menggunakan indikator produksi sereal) tidak termasuk dalam analisis komposit perkotaan mengingat ketersediaan sereal di wilayah perkotaan bukan berasal dari produksi sendiri tetapi sebagian besar berasal dari pembelian dari pasar, impor dari wilayah lain dan bantuan sosial pemerintah.

e. Sosialisasi Awal Penyusunan FSVA 2018

Pertemuan Sosialisasi Awal Penyusunan FSVA Tingkat Nasional dan Provinsi Tahun 2018 dilaksanakan di Hotel D'Anaya Bogor pada tanggal 12-13 Desember 2017. Pertemuan dibuka oleh Bapak Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan dihadiri oleh Pejabat eselon III/IV dan staf teknis yang menangani penyusunan FSVA

dari 19 provinsi. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan sosialisasi penyiapan penyusunan FSVA Nasional dan Provinsi tahun 2018. Perubahan yang terdapat pada FSVA 2018 jika dibandingkan dari FSVA 2015 adalah dari indikator dan metode analisis komposit.

- Indikator yang digunakan dalam FSVA 2018, terdiri dari:
 - ✓ Aspek ketersediaan pangan: rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan
 - ✓ Aspek akses pangan: persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan; (2) proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan terhadap pengeluaran total; dan (3) persentase rumah tangga tanpa akses listrik
 - ✓ Aspek pemanfaatan pangan: (1) rata-rata lama sekolah perempuan; (2) persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih; (3) rasio tenaga kesehatan terhadap 100.000 penduduk; (4) tinggi badan balita di bawah standar (*stunting*); dan (5) angka harapan hidup pada saat lahir.
- Metode analisis komposit.

Analisis ketahanan pangan komposit dibuat dengan menggunakan sembilan indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis. Metode analisis komposit FSVA Tahun 2018 dilakukan dengan metode pembobotan. Dasar pembobotan adalah analisis *multivariate* (analisis komponen utama) dan *expert judgement*.
- Adapun rencana tindak lanjut yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:
 - ✓ Melakukan penyusunan Tim FSVA tingkat provinsi yang bersifat lintas sektor;
 - ✓ Melakukan penyusunan rencana kerja penyusunan FSVA tingkat provinsi dengan mengacu pada agenda penyusunan FSVA nasional;
 - ✓ Melakukan validasi data indikator FSVA Nasional tingkat kabupaten yang telah disampaikan pada pertemuan sosialisasi awal;
 - ✓ Melakukan pengumpulan data indikator FSVA Provinsi tingkat kecamatan ;
 - ✓ Menyampaikan hasil validasi data tingkat kabupaten dan pengumpulan data tingkat kecamatan pada pertemuan Sosialisasi FSVA yang akan diselenggarakan pada bulan Februari 2018;
 - ✓ Memberikan dukungan teknis dan penganggaran dalam rangka penyusunan FSVA 2018.

E. Dukungan Instansi Lain

Pada tahun 2017 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mendapatkan dukungan dari beberapa instansi terkait antara lain :

(1) Badan Pusat Statistik (BPS), (2) Kementerian Kesehatan, (3) Kementerian Perdagangan, (4) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), (5) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), (6) Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, (7) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), (8) Kementerian Sosial, (9) Kementerian Dalam Negeri, (10) Bank Indonesia, (11) Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BPPN).

(12) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (13) Kementerian Kelautan dan Perikanan, (14) Perum Bulog, (15) Institut Pertanian Bogor (IPB) dan (16) *World Food Programme (WFP)*.

Dukungan yang diberikan berupa penyediaan data yang digunakan dalam analisis yang terkait kegiatan di Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Selain itu, BAPPENAS juga memberikan dukungan dengan menjadikan peta FSVA sebagai salah satu sumber wacana dalam penentuan indikator pembangunan desa.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum, kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan selama tahun 2017 telah berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, yang tampak dari hasil pengukuran kinerja dengan sasaran meningkatnya kualitas analisis ketersediaan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan, yang ditetapkan melalui 7 indikator berikut:

1. Kawasan mandiri pangan sebanyak 78 kawasan dengan capaian 77 kawasan atau 98,72 persen;
2. Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan pada 35 lokasi dengan capaian 35 lokasi atau 100 persen;
3. Pemberdayaan petani kecil dan gender pada 33.600 KK dengan capaian 27.115 KK atau 81 persen;
4. Dukungan produksi pertanian dan pemasaran pada 26.880 KK dengan capaian 26.880 atau 100 persen;
5. Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan pada 224 desa dengan capaian 224 desa atau 100 persen;
6. Dukungan manajemen dan administrasi SOLID sebanyak 12 bulan layanan dengan capaian 12 bulan layanan atau 100 persen;
7. Penanganan kerawanan pangan pada 1 lokasi dengan capaian 1 lokasi atau 100 persen.

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 134.834.658.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 131.481.072.884 atau 97,51 persen, yang dialokasikan pada di 7 kegiatan yang meliputi : Kawasan Mandiri Pangan, Pemantauan Ketersediaan, Akses dan Kerawanan Pangan, Jumlah KK Pemberdayaan Petani Kecil dan Gender, Jumlah KK yang Mendukung Produksi Pertanian dan Pemasaran, Jumlah Desa yang Mengembangkan Rantai Nilai Tanaman Perkebunan, Dukungan Manajemen dan Administrasi SOLID, dan Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan koordinasi antar instansi dan lintas sektor yang terkait, baik di pusat maupun di daerah;
2. Perlunya peningkatan koordinasi antar instansi di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota);
3. Perlunya sosialisasi kegiatan Pusat ke daerah;
4. Perlunya monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah;
5. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Pusat dan Daerah;
6. Perlunya dukungan anggaran di Pusat dan Daerah
7. Perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah.

Matrik Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Berdasarkan PK Triwulan I - IV Tahun 2017

No.	Penetapan Kinerja (PK)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target		Target dan Rencana Aksi Triwulan								Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja	Permasalahan	Tindak Lanjut
				I		II		III		IV				
				Rencana Aksi	Persentase Pencapaian (%)	Rencana Aksi	Persentase Pencapaian (%)	Rencana Aksi	Persentase Pencapaian (%)	Rencana Aksi	Persentase Pencapaian (%)			
1	Jumlah kawasan mandiri pangan	78	kawasan	Penyusunan pedoman, sosialisasi, rapat koordinasi, pelatihan petugas pelaksana	100	Pelatihan petugas pelaksana, pemberian bantuan	100	Pembinaan dan pemantauan	100	Workshop evaluasi, penyusunan laporan	100	Panduan pelaksanaan kegiatan		
2	Jumlah pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan	35	lokasi	Penyusunan panduan, rapat koordinasi, FGD, pengumpulan dan pengolahan data	100	Sosialisasi kegiatan, penetapan tim pelaksana, pengumpulan, pengolahan data	100	Pengumpulan, pengolahan dan analisis data	100	Penyusunan laporan	100	Panduan pelaksanaan kegiatan		
3	Jumlah KK pemberdayaan petani kecil dan gender	33.600	KK	Penyusunan pedoman, sosialisasi, rapat koordinasi, pelatihan petugas pelaksana	100	Pelatihan petugas pelaksana, pemberian bantuan	100	Pembinaan dan pemantauan	100	Penyusunan laporan	100	Panduan pelaksanaan kegiatan		
4	Jumlah KK yang mendukung produksi pertanian dan pemasaran	26.880	KK	Penyusunan pedoman, sosialisasi, rapat koordinasi, pelatihan petugas pelaksana	100	Pelatihan petugas pelaksana, pemberian bantuan	100	Pembinaan dan pemantauan	100	Penyusunan laporan	100	Panduan pelaksanaan kegiatan		
5	Jumlah desa yang mengembangkan rantai nilai tanaman perkebunan	224	desa	Penyusunan pedoman, sosialisasi, rapat koordinasi, pelatihan petugas pelaksana	100	Pelatihan petugas pelaksana, pemberian bantuan	100	Pembinaan dan pemantauan	100	Penyusunan laporan	100	Panduan pelaksanaan kegiatan		
6	Dukungan manajemen dan administrasi SOLID	12	bulan layanan	Koordinasi dan pemantauan	100	Koordinasi dan pemantauan	100	Koordinasi dan pemantauan	100	Penyusunan laporan	100	Panduan pelaksanaan kegiatan		

7	Jumlah penanganan kerawanan pangan	1	lokasi	Penyusunan panduan, sosialisasi, rapat koordinasi, pelatihan analisis SKPG, pengumpulan dan pengolahan data	100	Pengumpulan, pengolahan dan analisis data	100	Pengumpulan, pengolahan dan analisis data	100	Penyusunan laporan dan workshop hasil	100	Panduan pelaksanaan kegiatan		
---	------------------------------------	---	--------	---	-----	---	-----	---	-----	---------------------------------------	-----	------------------------------	--	--

Matrik Target dan Realisasi Capaian Kinerja Berdasarkan PK Triwulan I - IV Tahun 2017

No.	Penetapan Kinerja (PK)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target		Target dan Realisasi Triwulan								Ket	Permasalahan	Tindak Lanjut	
				I		II		III		IV					Kemajuan Pelaksanaan (%)
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	Jumlah kawasan mandiri pangan	78	kawasan	78		78		78		78					
2	Jumlah pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan	35	lokasi	35		35		35		35					
3	Jumlah KK pemberdayaan petani kecil dan gender	33.600	KK	33.600		33.600		33.600		33.600					
4	Jumlah KK yang mendukung produksi pertanian dan pemasaran	26.880	KK	26.880		26.880		26.880		26.880					
5	Jumlah desa yang mengembangkan rantai nilai tanaman perkebunan	224	desa	224		224		224		224					
6	Dukungan manajemen dan administrasi SOLID	12	bulan layanan	12		12		12		12					
7	Jumlah penanganan kerawanan pangan	1	lokasi	1		1		1		1					